

**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI
DALAM PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

*THE ANALYSIS OF COMMUNICATION STRATEGIES
IN RECOVERY OF SOCIO-ECONOMIC OF POST-FLOOD
AND LANDSLIDE DISASTERS
BY NORTH LUWU REGENCY GOVERNMENT*

**Muh. Taufik Rahmansyah Abdullah
E022182001**



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI
DALAM PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

*THE ANALYSIS OF COMMUNICATION STRATEGIES
IN RECOVERY OF SOCIO-ECONOMIC OF POST-FLOOD
AND LANDSLIDE DISASTERS
BY NORTH LUWU REGENCY GOVERNMENT*

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Komunikasi

Disusun dan Diajukan Oleh:

Muh. Taufik Rahmansyah Abdullah
E022182001

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

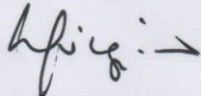
**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PEMULIHAN SOSIAL
EKONOMI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH
LONGSOR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh
MUH. TAUFIK RAHMANSYAH ABDULLAH
E022182001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **(11 Februari 2021)**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

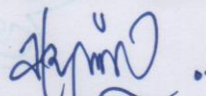
Menyetujui

Pembimbing Utama,



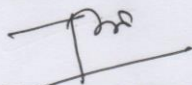
Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M. Sc.
Nip. 195204121976031017

Pembimbing Pendamping,



Dr. Arianto, S.Sos., M. Si.
Nip. 197307302003121002

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



Dr. H. Muhammad Farid, M. Si
Nip. 196107161987021001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Taufik Rahmansyah Abdullah

Nomor Pokok : E022182001

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2021

Yang Menyatakan



MUH. TAUFIK RAHMANSYAH ABDULLAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Analisis Strategi Komunikasi dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara”. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc dan Bapak Dr. Arianto, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan bantuan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung hingga tesis ini dapat selesai.

Penghargaan, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, Bapak Dr. Muliadi Mau, S.Sos, M.Si, dan Bapak Dr. Hasrullah, MA. Selaku tim penguji, yang senantiasa memberikan arahan, koreksi, dan saran dalam penyempurnaan tesis ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan doanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Farid, M.Si Selaku Ketua Program Studi Magister Komunikasi Universitas Hasanuddin yang dengan tulus dan sabar berkenan mengarahkan, dan membagi ilmu kepada penulis.
3. Ibu Hj. Indah Putri Indriani. S.IP., M.Si. selaku Bupati Kabupaten Luwu Utara, dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, S.E., M.T. Selaku Pjs Bupati Kabupaten Luwu Utara, yang telah meluangkan

waktunya untuk menjadi informan penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

4. Bapak Drs. H. Muslim Muchtar, M.Si. selaku Kepala BPBD Kabupaten Luwu Utara, dan Bapak Ismar Sukma, selaku Kepala Sub Bidang Rehabilitasi BPBD Kabupaten Luwu Utara, Ibu Besse Andi Pabeang selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, Bapak Ahmad Yani selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sekaligus ditugaskan sebagai Kepala Litbang khusus penanganan bencana, Bapak Anshar selaku Sekertaris Dinas Kominfo, Bapak Awaluddin selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Desa, Ibu Maryam Andi Kumba selaku Sekertaris Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa, Bapak Andi. Yasir Pasandre, S.Sos., M.Si. selaku Camat Kecamatan Baebunta, Bapak Mitra Samsi selaku Sekertaris Camat Kecamatan Masamba, dan seluruh jajarannya, yang telah banyak membantu dan mengarahkan segala yang menjadi kebutuhan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Luwu Utara.
5. Bapak Risman selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Masamba, Ambe Irwan selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Baebunta, Saudari Bella, dan Saudara Abdul Malik selaku relawan, dan seluruh informan pendukung (ibu Hadenia, ibu Fatmawati, ibu Nuraeni, bapak Agus Budiman, bapak Sonna, bapak Mallu, saudara Arman, dan saudara Muh. Fadly Syamsul) yang telah memberikan fasilitas dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian di daerah tersebut.
6. Ucapan terima kasih dan doa untuk kedua orang tua penulis Bapak Drs. H. Abdullah Makkuasang, dan Ibu Hj. Rahmatia Piri, S.Sos. serta saudara-saudari penulis Muh. Basrawi Abdullah dan Nurul Insani Abdullah yang selalu memberikan dukungan. Pencapaian ini penulis dedikasikan untuk kalian.

7. Seluruh Dosen Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada segenap staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dari proses perkuliahan hingga rampungnya proses penelitian.
9. Teman-teman bersepoluh E022182001-010 kelas regular mahasiswa Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2018 serta senior atas dukungan dan kebersamaannya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa apa yang dibahas dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penulisan tesis ini tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah dan ikhtiar kita, amin.

Makassar, 13 Februari 2021



Muh. Taufik Rahmansyah Abdullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTARA.....	11
A. Kajian Konsep.....	11
1. Komunikasi Bencana.....	11
2. Strategi Komunikasi.....	23
3. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi Pasca bencana.....	47
4. <i>Stakeholders</i> dalam Penanganan Bencana.....	52
B. Kajian Teori.....	62
1. Teori Perencanaan Komunikasi John Middleton.....	62
2. <i>Information, Reflexivity and Surveillance: Anthony Giddens</i>	64
3. <i>Chaos Theory</i>	70

C. Hasil Riset Relevan	75
D. Kerangka Konseptual	79
E. Definisi Operasional	82
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	83
B. Pengelolaan dan Peran Peneliti	83
C. Lokasi Penelitian	83
D. Teknik Pengembalian Sumber Data	84
E. Sumber Data	84
F. Teknik Pengumpulan Data	86
G. Teknik Analisis Data	88
H. Pengecekan dan Validitas Temuan	90
I. Tahapan dan Jadwal Penelitian	91
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	92
A. Hasil Penelitian.....	92
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	92
1.1. Sejarah Kabupaten Luwu Utara	92
1.2. Letak Geografis.....	97
1.3. Sosial dan Ekonomi Kabupaten Luwu Utara Sebelum Bencana	99
1.4. Kondisi Lingkungan Kabupaten Luwu Utara Sebelum Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor.....	107
2. Peristiwa Bencana banjir bandang dan tanah longsor	112
3. Program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor	116
4. Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor	124

B. Pembahasan Penelitian.....	164
1. Program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor	164
2. Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor	170
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran.....	189
Daftar Pustaka	191
Lampiran-Lampiran.....	194

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Info Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor Kabupaten Luwu Utara	3
Gambar 2.1 Definisi Komunikasi (West <i>and</i> Turner).....	14
Gambar 2.2 Pemetaan Komunikasi dalam Peristiwa Bencana	18
Gambar 2.3 Penjabaran Perencanaan Komunikasi dari Kebijakan Sampai Operasional.....	31
Gambar 2.4 Sistem Penanggulangan Bencana Di Indonesia	54
Gambar 2.5 Pembagian Peran dan Tugas	58
Gambar 2.6 Model Perencanaan Komunikasi John Middleton	64
Gambar 2.7 Kerangka Konseptual.....	81
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles <i>and</i> Hubermas	88
Gambar 4.1 Peta Geografis Kabupaten Luwu Utara.....	98
Gambar 4.2 Peta Penggunaan atau Tutupan Lahan	110
Gambar 4.3 Rumah Warga Tertimbun Tumpukan Sedimen Pasir.....	113
Gambar 4.4 Fasilitas Ibadah Terdampak Bencana	114
Gambar 4.5 Peta Satelit Sebelum dan Setelah Bencana	115
Gambar 4.6 Program Pemulihan Normalisasi Sosial Ekonomi	124
Gambar 4.7 Total Kerugian Pasca bencana	126

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 4.1 Jumlah Penduduk yang Terdampak Bencana.....	125
--	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian TerdahuluTerkait Komunikasi Bencana.....	75
Tabel 3.1 Informan Penelitian	85
Tabel 3.2 Tahapan dan Jadwal Penelitian	91
Tabel 4.1 Luas Daerah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019	96
Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.....	101
Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.....	103
Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah di Kabupaten Luwu Utara .	104
Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Sarana Perdagangan Menurut Jenis di Kabupaten Luwu Utar 2018-2019.....	106
Tabel 4.6 Jumlah Kelompok yang Berisiko Terkena Penyakit di Pengungsian	127
Tabel 4.7 Jumlah Sub. Klaster Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korban Terdampak Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor	127
Tabel 4.8 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Pendidik yang Terdampak Bencana banjir bandang dan tanah longsor.....	128
Tabel 4.9 Jumlah Kerugian Pada Sektor Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor 2020.....	129
Tabel 4.10 Matriks Identifikasi Permasalahan Pasca bencana	136
Tabel 4.11 Matriks Hasil Penelitian.....	156

ABSTRAK

MUH. TAUFIK RAHMANSYAH ABDULLAH. *Analisis Strategi Komunikasi dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca-Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor oleh Kabupaten Luwu Utara* (dibimbing oleh Hafied Cangara dan Arianto).

Penelitian ini bertujuan (1) memahami program kerja pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pemulihan sosial ekonomi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor, (2) menganalisis strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pemulihan sosial ekonomi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan sampel penelitian secara purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, program pemulihan yang dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dibagi berdasarkan klaster dengan menyelaraskan antara tindakan dan juga upaya komunikasi, yaitu klaster sosial (kesehatan, jaminan hidup, hunian, pendidikan, dan kegiatan keagamaan), klaster infrastruktur (normalisasi sungai, jembatan, ruas jalan, *intake*, bendungan, akses jaringan telekomunikasi), dan klaster ekonomi (mengaktifkan kembali perdagangan, pelaku umkn, pemberian modal usaha dan modal bibit kepada petani dan pelatihan). *Kedua*, strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu dengan membentuk tim penanggulangan bencana dengan melibatkan para relawan selaku komunikator, di mana pesan yang disampaikan menggunakan pendekatan persuasif, informatif, edukasi dan juga sosialisasi dengan tujuan penyelamatan terhadap korban, memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, bahkan menyebarkan informasi terkait pemulihan sosial ekonomi pascabencana. Pesan tersebut disampaikan melalui saluran atau media komunikasi seperti media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media sosial (*instagram, facebook, website* resmi pemerintah) yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap upaya pemulihan keberlangsungan hidup masyarakat Kecamatan Masamba dan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Komunikasi Bencana. Pemulihan Sosial Ekonomi, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.



ABSTRACT

MUH. TAUFIK RAHMANSYAH ABDULLAH. *The Analysis of Communication Strategies in Socio-Economic Recovery of Post-Flood and Landslide Disasters of North Luwu Regency* (supervised by Hafied Cangara and Arianto).

The research aims at: (1) comprehending the work programs of North Luwu Regency government in the socio-economic recovery of post-flood and landslide disasters, (2) analysing the communication strategies of North Luwu Regency government in the socio-economic recovery of post-flood and landslide disasters.

The research used the qualitative descriptive method through the case study approach. The research samples were determined using the purposive sampling technique.

The research result indicates that *first*, The recovery programs presented by North Luwu Regency government are divided based on clusters by harmonising an action and communication effort, namely the social clusters (health, life insurance, housing, education, religious activities), infrastructure clusters (rivers, bridges, road sections, dam intake, communication network access), and economic clusters (reactivating trade, UMKM (Business of Small, Medium Enterprise) actors, providing venture capital and seed capital to farmers, and training). *Second*, the communication strategies carried out by the government of North Luwu Regency are by forming a disaster management team by involving volunteers as the communicators, in which the messages conveyed use the *persuasive, informative, approaches, education* and as well as socialisation with the aim to save the victims, providing awareness to the community concerning the importance of protecting the environment, even disseminating information related to the socio-economic recovery of the post-disasters. The messages are conveyed through the social channels or media (*instagram, facebook, official website* of North Luwu Regency government) which, of course, will greatly affect the recovery effort for the people's survival at Masamba and Baebunta Districts, North Luwu Regency.

Key words: Communication strategy, disaster communication, socio-economic recovery, North Luwu Regency Government.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang, merupakan peristiwa alam yang sulit untuk diprediksi, sebab setiap bencana alam memiliki karakteristik dan besaran dampak yang ditimbulkan pun berbeda-beda, serta menyebabkan perubahan bahkan keterpurukan terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, merusak ekosistem lingkungan, mengancam tata kelola kehidupan sosial ekonomi, bahkan berdampak pada psikologis manusia.

Peristiwa bencana alam yang memporak-porandakan Kabupaten Luwu Utara yakni banjir bandang dan tanah longsor terjadi pada Senin, 13 Juli 2020, tepat pukul 21.00 Wita. Akibat adanya pengaruh fenomena anomali iklim yang memicu tingginya intensitas hujan yang tidak normal dan menyebabkan tiga sungai besar di Kabupaten Luwu Utara meluap pesat, hingga tidak cukup mampu menahan beban hidrologis air, diantaranya

sungai Meli di Kecamatan Baebunta, sungai Rongkong di Kecamatan Rongkong, dan sungai Masamba di Kecamatan Masamba.

Selain itu, terdapat pula enam kecamatan yang terdampak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut, seperti Kecamatan Baebunta, Sabbang, Baebunta Selatan, Malangke Barat, Malangke, dan Kecamatan Masamba. Dari ke enam kecamatan tersebut penulis hanya melakukan penelitian di dua kecamatan yang mengalami tingkat kerusakan terparah yaitu Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Masamba. Peristiwa bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut merupakan salah satu peristiwa atau bencana terdahsyat yang dialami masyarakat Kabupaten Luwu Utara di tahun 2020, sehingga pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus bekerja ekstra dalam melakukan upaya pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor.

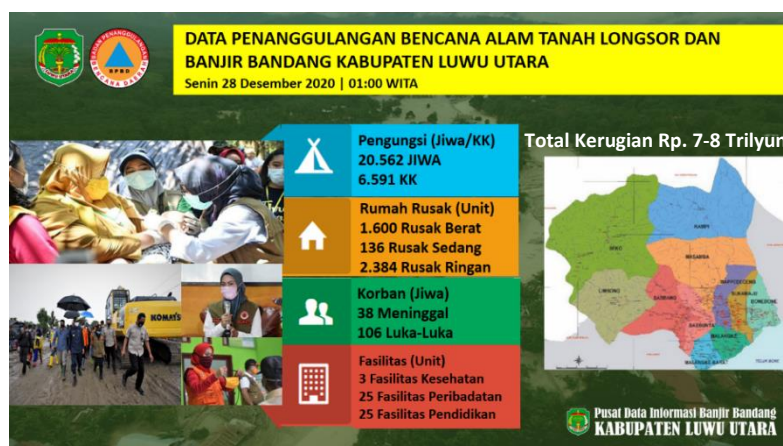
Sejarah menjelaskan bahwa letak geografis dari Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang rawan akan bencana besar maupun kecil, bahkan jauh sebelum bencana ini terjadi Kabupaten Luwu Utara telah diprediksi akan mengalami bencana alam seperti ini. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin dan Pakar Petrologi dan Geologi Adi Maulana, dikutip dari media nasional.tempo.co mengatakan bahwa:

“Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang berpotensi banjir dengan tingkat risiko tinggi, khususnya untuk daerah Masamba dan sekitarnya. Sebab daerah tersebut merupakan daerah pedataran yang sangat luas, yang terbentuk dari proses erosi (peristiwa pengikisan padatan) dan sedimentasi selama ribuan, bahkan jutaan tahun sehingga kondisi morfologi daerah ini bagaikan

cekungan kecil yang diapit oleh pegunungan di bagian utara, timur dan barat, dan dibatasi oleh Teluk Bone di bagian selatannya". (<https://nasional.tempo.co/read/1366135/kata-pakar-geologi-soal-penyebab-banjir-bandang-di-masamba>)

Gambaran di atas juga tercermin dari dampak peristiwa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020. Gambar di bawah ini menunjukkan gambaran terkait data dan total kerugian yang dialami akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor:

Gambar 1.1 Info Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor Kabupaten Luwu Utara



Sumber: Pusat Data Informasi Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara
(dikutip dari <https://banjirbandang.luwuutarakab.go.id/>)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa selain menimbulkan korban jiwa, peristiwa bencana banjir bandang dan tanah longsor juga merubah tatanan kondisi sosial ekonomi masyarakat, diantaranya banyaknya hunian warga yang rusak, mengakibatkan anak putus sekolah, minimnya kebutuhan akan air bersih dan listrik, meningkatkan jumlah pengangguran, menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu,

menimbulkan angka kemiskinan, terhambatnya aktivitas keagamaan, bahkan terdapat kerugian yang cukup besar yakni Rp. 7-8 Triliyun.

Melihat kerusakan dan kerugian yang dialami cukup besar, sehingga masuk akal jika pemulihan pasca bencana penting untuk dilakukan secara menyeluruh atau bahkan melibatkan banyak pihak, mulai pemerintah Kabupaten Luwu Utara, para *stakeholders* hingga pada lapisan masyarakat itu sendiri, karena hakikat dari proses penanganan pasca bencana adalah upaya membangun kembali kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, sumberdaya alam, dan modal sosial untuk dapat pulih kembali dan lebih baik.

Pada konteks ini komunikasi dipandang atau dapat menjadi salah satu cara ataupun pendekatan untuk penyampaian ide dan gagasan kepada masyarakat khususnya para korban untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat peristiwa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Untuk mencapai tujuan komunikasinya inilah, maka diperlukan sebuah strategi komunikasi yang efektif, demi keberhasilan tujuan yang diharapkan yaitu pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Menurut John Middleton (Cangara, 2017) perencanaan dan strategi komunikasi, menjelaskan bahwa:

“Strategi komunikasi merupakan kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran atau media, penerima, sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal”.

Dalam literasi bencana, komunikasi selama dan setelah bencana menjadi hal yang sangat diperhitungkan dalam ruang lingkup kebencanaan,

sebab selain digunakan dalam kondisi tanggap darurat, komunikasi juga dapat diimplementasikan dalam kondisi mitigasi bencana, penyebaran informasi, dan pemulihan pasca bencana yang tidak menentu dan penuh kepanikan. Fakta di lapangan tidak bisa disepelekan, bahwa terdapat hiruk pikuk pencarian informasi dari para korban, keluarga, bahkan berbagai lembaga tanggap bencana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, seringkali masyarakat mencari informasi melalui media massa, pihak yang berwenang, pemerintah daerah ataupun anggota masyarakat lainnya sebagai sumber utama dalam setiap bencana.

Penelitian terkait hal ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh (Suherman, 2019) dengan judul "*Strategi Komunikasi Bencana pada Masyarakat Kabupaten Buton Selatan*", pada penelitian ini terdapat persamaan pada fokus penelitian yaitu membahas tentang strategi komunikasi dalam penanganan bencana dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di mana unsur komunikasi yang turut menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan penanganan bencana yang sekiranya adalah pelaku komunikasi baik dari unsur pemerintah lokal maupun masyarakat.

Selain itu penelitian lainnya yang juga dilakukan oleh (Nicholls dan Healy, 2007) dengan judul "*Communication with disaster survivors: Towards best practice*". Pada penelitian ini berlatar belakang dari salah satu peristiwa serangan terorisme paling mengerikan yang pernah terjadi di Amerika Serikat adalah penyerangan menara World Trade Center (WTC)

atau yang lebih dikenal dengan serangan 9/11. Penggunaan komunikasi dalam upaya membantu pemulihan masyarakat korban tragedi New York dan London. Persamaan penelitian ini terletak pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh lembaga dan individu yang terlibat dalam membantu pemulihan orang-orang yang selamat. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai bencana non-alam sedangkan penulis lebih kepada bencana alam dan di sisi lain objek dan fokus penelitian yang menjadi pembeda. Serta (Tagliacozzo dan Magni, 2016) dengan judul "*Communicating with communities (CwC) during post-disaster reconstruction: an initial analysis*", pada penelitian ini membahas mengenai kebutuhan informasi dan komunikasi penduduk selama proses rekonstruksi pasca bencana yang melanda Emilia-Romagna (Italia Utara) pada tahun 2012. Penelitian ini memiliki persamaan terkait peran komunikasi pada saat manusia sedang mengalami bencana yang dianggap sebagai bagian integral dari bantuan kemanusiaan. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu terletak pada penggunaan pendekatan metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method*, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Pada hakikatnya strategi merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, dan sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh sebagian masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik ataupun cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana setiap taktik operasionalnya.

Berhasil tidaknya suatu penanganan bencana salah satunya bergantung pada bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi baik pemerintah maupun swasta. Menurut Efendy (Suherman, 2019), menjelaskan:

Strategi komunikasi pada hakikatnya paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, sehingga strategi komunikasi dapat dikatakan serangkaian tindakan yang telah disusun maupun direncanakan secara baik untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan berbagai metode, teknik, dan juga pendekatan komunikasi.

Menyikapi peristiwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, membuat penanganan bencana di Kabupaten Luwu Utara tersebut kini memasuki fase pemulihan sosial ekonomi. Dalam fase tersebut melakukan penanganan dan pemulihan pasca bencana tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan suatu perencanaan ataupun strategi yang matang, sistem pengorganisasian sesuai tupoksi, biaya yang cukup besar, menguras tenaga dan pikiran, membutuhkan waktu yang cukup panjang, sosialisasi secara bertahap, bahkan penggunaan saluran media komunikasi dan cara penyampaian juga harus dilakukan dengan tepat.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari suatu persoalan langkah terbaik dengan masuk atau berada secara langsung ke dalam situasi tersebut, mengingat kondisi yang terjadi di Kabupaten Luwu

Utara sangat menyita perhatian dan harus dikaji bukan hanya dari perspektif kebencanaan tetapi juga dari perspektif komunikasi sebagai aspek terpenting dalam setiap aktivitas penanganan pasca bencana dalam hal ini terkait strategi komunikasi, dengan melihat sejauhmana proses komunikasi yang berjalan dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi baik itu siapa yang menyampaikan, pesan yang disampaikan seperti apa, saluran atau media komunikasi yang digunakan, serta pengaruh yang dihasilkan kepada khalayaknya. Hal tersebut memantik penulis untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Strategi Komunikasi dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah diuraikan di atas maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana program pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor?
2. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki suatu tujuan, mengacu pada latar belakang ataupun rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk memahami program pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor.
2. Untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian yang sistematis juga memiliki suatu kegunaan penelitian. Maka secara garis besar penelitian ini memiliki manfaat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah terkait penanganan bencana dalam perspektif komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademik ilmu sosial terkhusus ilmu komunikasi, serta pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dalam menakar keberhasilan strategi komunikasi dalam penanganan bencana terkait pemulihan sosial ekonomi pasca

bencana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian serupa dan memperkaya data, studi ilmu komunikasi dan ilmu terkait lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Komunikasi Bencana

Bencana alam seolah-olah menjadi akrab ditelinga, bahkan disejumlah kawasan. Interaksi dengan bencana adalah suatu kelaziman yang tidak bisa dihindarkan, terdapat unsur kepasrahan ketika bencana dikaitkan dengan nasib manusia dalam mitos, legenda, dan dan cerita rakyat yang berujung kepada pelembagaan nilai fatalistik menghadapi bencana. Kendati kemudian, bukan berarti semua keyakinan dasar masyarakat yang bersumber kepada nilai-nilai tradisional, khususnya di kawasan rentan bencana selalu merugikan, sebab teramat banyak pesan yang terkandung dalam cerita rakyat maupun mitos yang berkembang, justru memberikan pelajaran berharga cara menghadapi bencana alam (Susanto dkk., 2011).

Tidak dapat dipungkiri jika negara Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Mengetahui bahwa kepulauan Indonesia termasuk ke dalam wilayah *Pasific Ring Of Fire* (deretan gunung merapi Pasifik) yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera Jawa-Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Mencermati kembali berbagai rentetan tragedi bencana alam yang memilukan dan menimbulkan trauma kepada masyarakat, seperti gempa bumi di Aceh (2004), gempa bumi di Yogyakarta (2006), Lumpur Lapindo di Sidoarjo (2006), Gempa bumi di Papua (2006),

dan banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara-Sulawesi Selatan (2020). Berbagai bencana tersebut merupakan salah satu pesan yang diberikan alam kepada manusia yang sangat jelas dan memberikan keterpurukan yang luar biasa terhadap keamanan dalam menjalani hidup dari rentetan peristiwa yang terjadi di Indonesia.

Bencana dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sering kali tidak mampu kita duga karena ketika suatu bencana terjadi, dapat menelan korban jiwa dan kerusakan. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana terbagi atas tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana Alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Bencana yang tergolong sebagai bencana alam yakni gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, banjir dan tanah longsor. Menurut Lestari dalam buku Komunikasi Bencana (Susanto dkk., 2011) menjelaskan perihal banjir dan tanah longsor :

- a. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat tegangannya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Penyebab utama dari longsor tersebut adalah gaya gravitasi yang memengaruhi lereng yang curam. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi terjadinya longsor, diantaranya: erosi yang disebabkan oleh aliran permukaan, sungai, dan gelombang laut yang menggerus kaki-kaki lereng dan masih banyak faktor lainnya.
- b. Banjir merupakan peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan dikarenakan volume air yang meningkat. Bencana banjir dapat terjadi karena masi kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak tinggal dipinggir sungai. Kecenderungan masyarakat untuk tinggal di bantaran sungai ini juga dipengaruhi oleh tingginya harga lahan dan sewa lahan, terutama di daerah

perkotaan. Selain itu, berbagai permasalahan lingkungan mulai dari tingkat global hingga lokal. Misalnya, perubahan iklim, kurangnya daerah resapan air di daerah hulu, tingginya daerah terbangun di daerah hilir, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai turut menambah frekuensi terjadinya banjir.

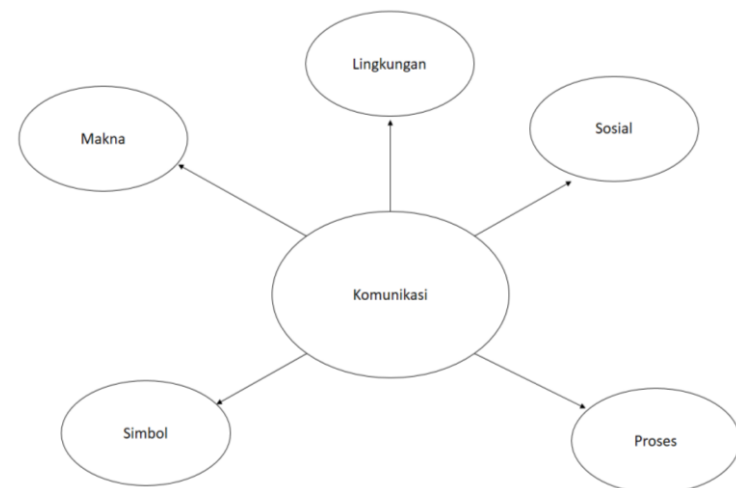
Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non alam. Salah satu jenis bencana non alam adalah wabah penyakit, epidemi, gagal teknologi dan gagal modernisasi. Bencana Sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat, dan teror.

Bencana telah mengubah konfigurasi dan tatanan sosial manusia. Dinamika penanganannya pun menuntut keseriusan serta keteguhan untuk menjadikan kondisi yang terjadi sebagai cara dan jembatan yang menghubungkan keberagaman identitas yang selama ini sering menjadi faktor pembeda antarmanusia. Penanganan bencana yang mengacu pada peraturan, jika ditinjau dari aspek legal memang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, nuansa birokrasi yang berbelit-belit tetap tidak bisa dihindari.

Karena itu, mengingat aspek legal wajib dijalankan dan secara substansial negara ataupun pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman dalam penanggulangan bencana, baik itu mitigasi bencana, tanggap darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi ataupun

pemulihan pasca bencana, sedangkan penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat. Maka peran komunikasi dalam menyampaikan informasi secara cepat, merupakan salah satu jalan untuk mendukung penanganan bencana yang eskalasinya meningkat. Menurut West and Turner dalam Komunikasi Bencana (Susanto dkk., 2011) komunikasi merupakan suatu proses ataupun kejadian yang berkesinambungan, dinamis, dan tidak memiliki akhir.

Gambar 2.1 Definisi Komunikasi (West and Turner)



Sumber : Komunikasi Bencana
(Susanto dkk., 2011)

Gambar di atas menjelaskan bahwa sosial artinya manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Simbol berarti suatu label yang diberikan kepada sebuah fenomena. Makna merupakan sesuatu yang diambil orang atas suatu pesan. Pesan memiliki lebih dari satu makna, dan makna memiliki konsekuensi budaya, sedangkan Lingkungan merupakan situasi atau konteks di mana komunikasi terjadi,

terkait dengan waktu, tempat, periode sejarah, relasi, dan latar belakang budaya antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

Banyak para akademisi khususnya stratra satu sulit membedakan antara komunikasi organisasi dengan komunikasi bencana, di mana komunikasi organisasi merupakan suatu proses pertukaran informasi di dalam suatu organisasi dalam hal ini terkait koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam suatu kelompok yang terorganisir. Sedangkan komunikasi bencana merupakan suatu penerapan ilmu komunikasi dalam penanganan krisis kebencanaan. Mencermati apa yang seharusnya dilakukan dalam penanganan bencana, mestinya komunikasi memiliki peranan penting untuk menangani bencana. Komunikasi yang mendasari hubungan manusia, dalam konteks bencana, berupaya menemukan alternatif solusi dalam mengatasi persoalan, sehingga peran dan posisi komunikasi lebih pada upaya yang mengarah pada tindakan kolektif guna membantu sesama yang terkena bencana yang selaras serta berdimensi jangka panjang, luas, dan berkontribusi pada banyak aspek.

Komunikasi mempunyai sejumlah ruang lingkup pembahasan sosial, termasuk dalam bidang kebencanaan. Pada dasarnya komunikasi bencana belum menjadi konsep populer dalam bidang komunikasi maupun bidang kebencanaan. Meski penelitian komunikasi bencana sendiri telah banyak dilakukan, namun di Indonesia kajian komunikasi terkait bencana baru banyak dilakukan setelah peristiwa bencana alam gempa dan tsunami Aceh tahun 2014 (Rudianto, 2015). Meski demikian, kesadaran akan pentingnya

komunikasi dalam penanganan bencana semakin tinggi belakangan ini. Menurut Frank Dance (Littlejohn dan Foss, 2009) salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian.

Komunikasi muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana.

Menurut Wood dalam Komunikasi Bencana (Susanto dkk., 2011), komunikasi dapat memberikan pemahaman tentang interaksi antar manusia, yang berlangsung terus menerus, yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Dengan kata lain, semua pihak yang melakukan penanganan bencana harus berpijak kepada fungsi komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi, menciptakan pemahaman dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam penanganan bencana ataupun membantu para korban bencana.

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Menurut Profesor Wilbur Schram dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2019), menjelaskan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa

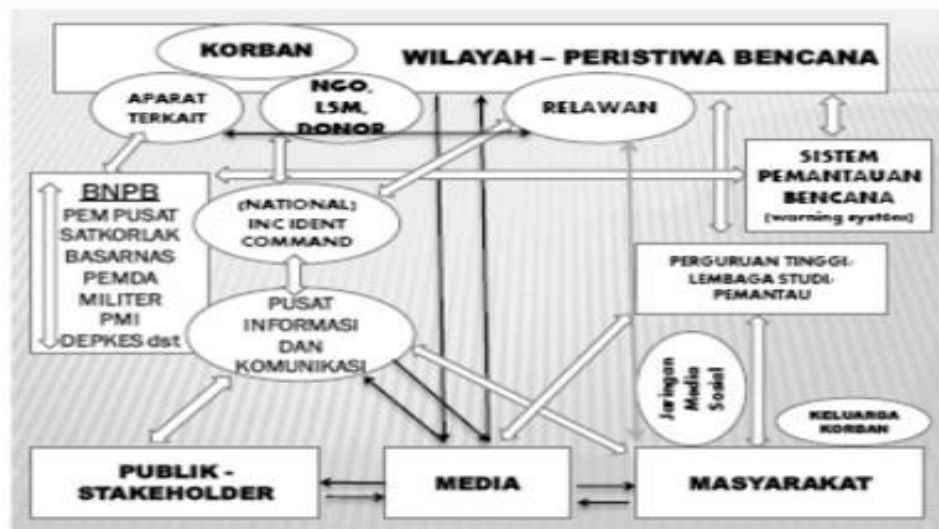
masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Pendek kata manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, karena memang manusia adalah makhluk yang dikodratkan untuk hidup berkomunikasi.

Dalam membangun komunikasi kepada masyarakat, informasi atau pesan yang disampaikan harus tepat dan akurat, agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal penyampaian informasi atau pesan dan tidak menimbulkan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda (*miscommunication*). Menurut Haddow dan Haddow (Suherman, 2019) *Disaster Communications In A Changing Media World*, ada 5 tahapan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif :

- a. *Customer Focus*, yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat.
- b. *Leadership Commitment*, yaitu pemimpin yang berperan dalam tanggapan darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.
- c. *Inclusion of Communication is in Planning and Operations*, yaitu spesialis komunikasi harus dilibatkan dalam semua perencanaan dan operasi darurat untuk memastikan bahwa mengkomunikasikan informasi yang tepat waktu dan akurat harus dipertimbangkan saat keputusan tindakan diperimbangkan.
- d. *Situational Awareness*, ialah komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci.
- e. *Media Partnership*, yakni media seperti televisi, surat kabar, radio dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerjasama dengan menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang terlatih untuk bekerjasama dengan media untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan kepada publik.

Menurut Green III dalam Komunikasi Bencana (Susanto dkk., 2011), menjelaskan peran informasi yaitu bahwa dalam keadaan bencana terdapat berbagai data dan beragam masukan, yang di mana data tersebut dapat bernilai lebih untuk keberhasilan penanganan bencana. Maka gambar 2.2 dibawah ini akan menggambarkan pemetaan komunikasi dalam peristiwa bencana:

Gambar 2.2 Pemetaan Komunikasi dalam Peristiwa Bencana



Sumber : Komunikasi Bencana
(Susanto dkk., 2011)

Berdasarkan gambar di atas, kita lihat bahwa arah panah tentu menggambarkan suatu koordinasi antar lini. Menjelaskan bahwa terdapat potensi hubungan interaksi, yang berkaitan dengan koordinasi, informasi, komunikasi dan kerja sama (KKIK). Di mana menunjukkan adanya proses verifikasi, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penanganan bencana. Pengordinasian pesan-pesan bencana secara integratif mungkin tidak cukup mudah untuk dilakukan secara bersama, karena terdapat kebiasaan-kebiasaan bobrok yang ditanam oleh para

pelaku kepentingan yakni mereduksi ataupun menambahkan pesan-pesan yang sering kali menghantui proses penanganan bencana.

Menurut Wardhani (Lestari, 2018) komunikasi bencana adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau tindakan. Komunikasi juga menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari pelaku yang terlibat sehingga dalam kegiatan komunikasi terjadi pokok perhatian yang sama terhadap topik yang dibicarakan.

Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pasca bencana. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana. Tujuan komunikasi bencana untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat siap siaga menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana. Manfaat komunikasi bencana, yaitu mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana. Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Dalam buku komunikasi bencana (Tamitiadini dkk., 2019) dijelaskan

beberapa syarat agar informasi tentang penanganan bencana dapat diterima masyarakat dengan efektif, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang menyampaikan pesan (*trustworthy*).
- b. Adanya *authoritative* pihak yang menyampaikan pesan adalah pihak yang dianggap memiliki kewenangan atau kualifikasi sebagai pengirim informasi, karena setiap individu bebas untuk memilih siapa pihak yang ingin didengarkan.
- c. Tidak adanya kepentingan untuk memperoleh sesuatu dari informasi yang disampaikan. Masyarakat harus merasa yakin bahwa informasi yang diperoleh tidak memiliki kepentingan tertentu (*free of personal gain*).
- d. Informasi yang disampaikan hendaknya akurat, dapat dikonfirmasi bahkan dapat didukung oleh data-data.
- e. Konsistensi dalam penyampaian pesan, terutama pesan yang disampaikan secara berulang. Pesan yang disampaikan melalui media yang berbeda seperti radio, cetak, internet, berisi konten yang sama.
- f. Pesan disampaikan berulang-ulang untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat (*repetitive*).
- g. Pesan hendaknya mudah dipahami (*easy understood*) dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti istilah yang sering dipahami masyarakat setempat, tingkat pendidikan, faktor geografi dan sebagainya.
- h. Agar pesan mudah dimengerti, perlu dipertimbangkan faktor rasionalitasnya. Informasi disampaikan secara konkret misalnya mengenai area yang terdampak, rentan waktu kerawanan bencana dan sebagainya.
- i. Informasi hendaknya mudah diakses oleh semua orang.
- j. Informasi yang disampaikan hendaknya juga memberikan solusi bagi masyarakat sehingga komunikasi berlangsung efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal mengenai hal-hal mendasar mengenai komunikasi bencana. *Pertama*, komunikasi berperan dalam mengurangi ketidakpastian yang menjadi karakteristik sebuah bencana. *Kedua*, komunikasi menjadi aktivitas utama yang berpengaruh pada mitigasi bencana guna peringatan dini dan edukasi bagi masyarakat. *Ketiga*, keberhasilan penanganan bencana dipengaruhi

sistem komunikasi dalam kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah dan pihak swasta.

Komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesiagaan yang diperlukan dan persiapan apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Semua ini, dimaksudkan untuk mengurangi dan meminimalisir penyintas, serta kerugian harta benda. Upaya penanggulangan bencana harus dimulai jauh sebelum bencana terjadi karena antisipasi sedini mungkin akan mampu menekan jumlah kerugian jiwa dan materi. Dalam buku Komunikasi Bencana (Lestari, 2018), menjelaskan ada empat fungsi komunikasi bencana, antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi sebagai Radar Sosial,

Komunikasi bencana berfungsi untuk memastikan atau memberi informasi terkait peristiwa atau keyakinan kepada pihak lain mengenai informasi yang sedang berlangsung, bahwa bila ada informasi yang baru dan relevan dengan kehidupan masyarakat, masyarakat yang memperoleh informasi itu dapat menggunakannya dalam pergaulan sehari-hari agar tidak ketinggalan informasi. Komunikasi juga dapat membangun kerja sama dan radar sosial antarmanusia sehingga memudahkan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Radar sosial berguna bagi setiap individu untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan terjadi dikemudian hari. Hal ini juga berlaku pada konteks ilmu lain, seperti komunikasi dalam bencana. Adanya komunikasi sebagai radar sosial diharapkan mampu untuk menjadi

perpanjangan tangan pemerintah berwenang untuk menginformasikan atau mewaspadaikan suatu bencana.

b. Komunikasi sebagai Manajemen,

Komunikasi sosial berfungsi sebagai dasar tindakan atau kegiatan komunikasi yang menjadi alat untuk mengatur atau mengendalikan anggota komunitas dan anggota ini mengetahui apa yang diharapkan pihak lain terhadap dirinya dalam hidup bermasyarakat. Artinya, manajemen adalah proses di mana kita memulai untuk mengoordinasi sesuatu. Faktor penting dalam manajemen adalah bagaimana kita dapat mencapai sebuah tujuan. Keseimbangan dari tujuan-tujuan dan kenyataan di lapangan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan begitu, manajemen dalam komunikasi penting untuk membuat pekerjaan menjadi efektif dan lebih efisien.

c. Komunikasi sebagai Sarana Sosialisasi

Kegiatan komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan atau pendidikan bagi warga atau generasi baru dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan ini disebut sebagai proses sosialisasi. Sosialisasi memang serupa dengan proses koordinasi, namun sosialisasi lebih berarti mengedukasi. Memberi informasi terkait dengan memberi pemahaman dan menanamkan nilai, norma, peran dan pola perilaku dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok bermasyarakat.

d. Komunikasi sebagai Media Hiburan

Media komunikasi berfungsi untuk menghibur masyarakat atau kegiatan yang dapat melepaskan ketegangan hidup bermasyarakat. Dalam komunikasi bencana diperlukan keahlian dan kemampuan yang tidak sekedar menyampaikan pesan bencana secara meluas, namun juga diperlukan kemampuan membentuk semangat untuk berbagi dengan penuh empati. Dengan mengetahui kondisi psikis dan mental penyintas pasca bencana, komunikator juga dapat memberikan hiburan yang dinilai dapat membuat penyintas terbangun dan tidak terlarut pada kesedihan. Diketahui bahwa bencana adalah kejadian paling tidak terduga, apalagi ketika kita yang menjadi penyintasnya. Oleh karena itu, penanaman kemampuan berkomunikasi seseorang harus disertai kemampuan untuk menghibur dan membangun bagi penyintas bencana, seperti halnya *trauma healing* dan sebagainya.

2. Strategi Komunikasi

Strategi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu '*stratos*' artinya tentara dan kata '*again*' yang artinya memimpin. Dengan demikian, strategi yang dimaksud adalah ilmu tentang memimpin tentara atau pasukan. Kemudian muncul kata *strategos* pemimpin tentara pada tingkat atas (Cangara, 2017). Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan seni para jendral atau suatu rancangan terbaik untuk memenangkan peperangan.

Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi, karena itu para pakar strategi tidak saja lahir dari kalangan yang memiliki latar belakang militer tapi juga dari profesi lain, misalnya pakar strategi Henry Kissinger berlatar belakang sejarah, Thomas Schelling berlatar belakang ekonomi, dan Albert Wohlsetter berlatar belakang matematika. Para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Definisi lain dikemukakan oleh Anwar Arifin (Hutomo, 2017) strategi dinyatakan sebagai “keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam menjalankan strategi harus ada perencanaan yang jelas terutama langkah-langkah apa saja akan ditetapkan dalam mencapai tujuan. Strategi tidak cukup hanya perumusan konsep dan implementasi terhadap strategi tersebut melainkan juga dibutuhkan evaluasi terhadap strategi yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Menurut David (Hutomo, 2017) menjelaskan bahwa dalam manajemen strategi terdapat tiga tahapan strategi, diantaranya:

a. **Perumusan strategi,**

Merupakan tahapan pertama dalam strategi. Dalam tahap ini para pencipta, perumus, penkonsep harus berfikir mengenai kesempatan dan ancaman dari luar organisasi dan menetapkan kekuatan dan kekurangan dari dalam organisasi, serta menentukan sasaran yang tepat. Menghasilkan strategi cadangan dan memilih strategi yang akan dilaksanakan. Dalam perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah di dalam organisasi. Setelah itu dilakukan analisis tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk keberhasilan menuju tujuan strategi

tersebut. Dalam tahap ini sebagian orang memahami sebagai tahap pertama untuk memformulasikan sebuah perencanaan yang dimulai dengan melihat peluang serta bahaya yang berasal dari luar organisasi, serta menetapkan kekurangan dan kelebihan organisasi. Kemudian dihasilkan strategi-strategi untuk kemajuan perusahaan.

b. Implementasi strategi,

Tahapan di mana setelah strategi dirumuskan yaitu pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tersebut berupa penerapan atau aksi dari strategi. Strategi yang dimaksudkan adalah strategi yang telah direncanakan pada tahap pertama yaitu perumusan strategi. Pada tahap ini peneliti memahami merupakan tahap aksi yang membutuhkan komitmen serta kerja sama dari seluruh divisi dalam perusahaan. Jika komitmen dan kerjasama tidak terjalin dengan baik maka kecil kemungkinan strategi terwujud. Sebab ujung tombak dari strategi adalah kepemimpinan perusahaan dan budaya perusahaan yang saling mendukung.

c. Evaluasi strategi,

Tahapan terakhir ini merupakan tahapan yang diperlukan karena dalam tahap ini keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk penetapan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur berhasil atau tidak, sesuai atau tidaknya strategi yang telah diterapkan. Maksudnya dalam tahap evaluasi dari strategi yang telah diaksikan ini adalah tahap yang sangat diperlukan, sebab di tahap ini bisa terlihat bagaimana strategi yang dijalankan telah benar atau masih butuh perbaikan. Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin *Communico* yang artinya membagi (Cangara, 2019). Menurut Handoko (Hutomo, 2017), mendefinisikan kata komunikasi sebagai suatu proses

pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain.

Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal dan sebagainya. Dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2019), komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memengaruhi pengetahuan dan perilaku seseorang. Dari pengertian komunikasi yang sederhana ini, maka kita bisa mengatakan bahwa suatu proses komunikasi tidak akan bisa berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur, seperti: pengirim (*source*), pesan (*message*), saluran atau media (*channel*), penerima (*receiver*), dan akibat atau pengaruh (*effect*). Unsur-unsur tersebut dapat juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Pada awal 1960-an David K. Berlo (Cangara, 2019) membuat formulasi yang lebih sederhana. Formula itu dikenal dengan nama "SMCR", yaitu: *Source* (pengirim), *Message* (pesan), *Channel* (saluran media), dan *Receiver* (penerima).

Setiap peristiwa komunikasi dalam tingkat apapun, apakah komunikasi interpersonal, intrapersonal, organisasi, atau sebagainya, tentu akan melibatkan elemen-elemen komunikasi. Para ahli komunikasi telah lama meneliti masing-masing elemen komunikasi untuk menentukan peran dari masing-masing elemen dalam menentukan efektivitas komunikasi. Pada umumnya studi komunikasi pada masa lalu lebih menekankan pada

upaya bagaimana membujuk (persuasi) sebagai bentuk efek yang diinginkan. Komunikasi tidak hanya terbatas pada upaya membujuk tetapi juga memaksa (Morissan, 2013).

Ilmu komunikasi berusaha memahami produksi, proses, dan pengaruh sistem simbol dan isyarat dengan mengembangkan berbagai teori yang dapat diuji, yang berisi berbagai generalisasi yang menjelaskan fenomena yang dikaitkan dengan produksi, proses, dan efek tersebut (Syam, 2013). Defisini ini mencakup berbagai konteks komunikasi termasuk produksi, pengolahan (proses), atau dampak sistem simbol atau isyarat (termasuk isyarat nonverbal) dalam konteks interpersonal, organisasi, massa, politik, pengajaran dan konteks lainnya.

Menurut Harold D. Laswell salah seorang peletak dasar ilmu komunikasi lewat ilmu politik menyebut tiga fungsi dasar komunikasi yang menjadi penyebab kenapa manusia harus berkomunikasi (Cangara, 2019). *Pertama*, adalah hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya, karena melalui komunikasi manusia dapat mengetahui peluang-peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara dan menghindar pada hal-hal yang mengancam alam sekitarnya. *Kedua*, adalah upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, di mana proses kelanjutan suatu masyarakat sesungguhnya tergantung bagaimana masyarakat itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya. *Ketiga*, adalah upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi, karena suatu masyarakat yang ingin

mempertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakatnya dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku dan peranan.

Pada dasarnya komunikasi dipelajari karena kita sebagai pelaku komunikasi ingin mengetahui seberapa besar pengaruh suatu komunikasi kepada seseorang yang kita ajak berkomunikasi. Untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dimulai dari pelaku komunikasi yaitu komunikan dan komunikator. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat metode ataupun pendekatan komunikasi yang efektif yaitu (Hutomo, 2017):

- a. **Redundancy (repetition)** Adalah memengaruhi khalayak dengan cara mengulang – ulang pesan kepada khalayak. Dengan metode ini banyak manfaat yang dapat ditarik. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena justru berkonsentrasi pada pesan yang diulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak menarik perhatian. Manfaat lainnya, bahwa khalayak tidak akan mudah melupakan hal yang penting disampaikan berulang-ulang itu. Selanjutnya dengan metode repetition ini, komunikator memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dalam penyampaian-penyampaian sebelumnya.
- b. **Informatif**, Dalam dunia komunikasi massa dikenal salah satu bentuk pesan yang bersifat informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan memengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Penerangan berarti penyampaian suatu apa adanya, apa sesungguhnya. Dengan kata lain, penyampaian sesuatu sesuai dengan fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar. Jadi dengan penerangan (*information*) berarti pesan-pesan yang dilontarkan itu berisi tentang fakta-fakta dan pendapat-pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga bagi komunikan dapat diberi kesempatan untuk menilai, menimbang-nimbang dan mengambil keputusan atas dasar pemikiran-pemikiran yang sehat.
- c. **Persuasif**; berarti memengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya, terutama perasaannya. Metode persuasif ini merupakan suatu cara untuk memengaruhi komunikasi dengan tidak diberi

kesempatan untuk banyak berfikir kritis, bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar (*suggestive*). Dengan demikian, metode ini komunikator terlebih dahulu menciptakan situasi di mana komunikasi mudah terkena sugesti (*suggestible*). Untuk terjadinya sugesti pada individu atau khalayak dapat dipermudah dengan jalan:

- Menghambat (*inhibition*).
 - Memecah belah (dissociation) proses berfikirnya.
 - Hambatan dalam proses berfikir terjadi karena kelelahan dan emosional
- d. **Edukatif Method** (metode pendidikan); Salah satu usaha untuk memengaruhi khalayak, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi: pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Metode ini dapat juga disebut metode mendidik. Mendidik berarti memberikan ide kepada khalayak, apa adanya dari segi kebenarannya, dengan sengaja, teratur dan berencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia kearah yang diinginkan.
- e. **Cursive Method**; yang berarti memengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan-gagasan atau ide-ide yang dilontarkan, oleh karena itu pesan dari komunikator ini selain pendapat-pendapat juga berisi ancaman-ancaman. Metode kursif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan intimidasi-intimidasi dan untuk pelaksanaannya yang lebih lancar, biasanya dibelakangnya berdiri kekuatan yang cukup tangguh.

Rogers (1982) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui atmosfer ide-ide baru. Seorang pakar perencanaan John Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan “strategi komunikasi merupakan kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Cangara, 2017).

Komunikasi dapat menjadi lebih esensial ketika memberi kontribusi terhadap proses penanganan bencana alam, non alam, maupun sosial. Untuk situasi kebencanaan seperti banjir bandang dan tanah longsor, tentunya diperlukan suatu siklus pencegahan yang kuat dalam artian, aspek komunikasi, informasi, dan kepemimpinan yang terintegritas dalam menggerakkan sumber daya yang ada.

Strategi komunikasi dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam melaksanakan suatu tindakan yang dilakukan melalui berbagai pertimbangan yang matang, agar tidak menimbulkan carut marut dalam proses implementasi. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, dan tenaga.

Menurut Ely D. Gomez dalam buku Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Cangara, 2017), bahwa membicarakan kebijaksanaan komunikasi bisa saja dilakukan tanpa membicarakan perencanaan komunikasi, tetapi membicarakan perencanaan komunikasi tidak mungkin dilakukan tanpa mengaitkan dengan kebijaksanaan komunikasi. Sebab kebijaksanaan komunikasi merupakan perencanaan strategik jangka panjang yang harus dijabarkan ke dalam perencanaan operasional. Maka gambar 2.3 dibawah ini akan menjelaskan penjabaran perencanaan ataupun strategi dari kebijakan awal sampai operasional (implementasi).

Gambar 2.3 Penjabaran Perencanaan Komunikasi dari Kebijakan sampai Operasional



Sumber: Perencanaan dan Strategi Komunikasi
(Cangara, 2017)

Persoalan yang timbul adalah konsep strategi komunikasi kadang disamakan dengan kebijakan komunikasi (*communication policy*), padahal strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi. Konsep strategi memang kadang juga mengalami duplikasi dengan konsep perencanaan strategik yang nota bene adalah kebijaksanaan komunikasi. Salah satu unsur yang terdapat pada strategi komunikasi bencana yaitu penggunaan metode, teknik, dan unsur komunikasi, yang nantinya dapat menjadi suatu tindakan awal demi terciptanya tujuan yang diinginkan.

Penetapan strategi komunikasi tentu saja kembali kepada elemen dasar dari komunikasi itu sendiri, yaitu *who say what, to whom through what channels, and what effect*. Oleh karena itu, dalam buku perencanaan dan

strategi komunikasi (Cangara, 2017), dalam menjalankan strategi komunikasi harus diawali langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memilih dan menetapkan komunikator

Dalam berbagai kajian komunikasi, komunikator menjadi sumber dan kendali utama semua aktivitas komunikasi, karena itu jika suatu proses komunikasi tidak berhasil dengan baik. Maka kesalahan utama bersumber dari komunikator, karena komunikator yang mampu memahami penyusunan pesan, memilih media yang tepat, dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran.

Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan penting. Untuk itu seorang komunikator yang akan bertindak sebagai ujung tombak suatu program harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kreativitas. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang komunikator yaitu, tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas), daya tarik (*attractive*), kekuatan (*power*). Kredibilitas yang dimaksud yaitu seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang komunikator sehingga bisa diterima oleh target sasaran.

Menurut Josep Gobbel, seorang Menteri Propaganda Hitler dalam Peran Dunia II menyatakan bahwa untuk menjadi seorang komunikator yang handal dan efektif harus memiliki kredibilitas yang tinggi di mata pendengar. Menurut Aristoteles (Cangara, 2017), kredibilitas dapat diperoleh jika seorang komunikator memiliki *ethos*, *pathos*, dan *logos*.

Ethos menunjukkan karakter kepribadian seseorang sehingga ucapannya dapat dipercaya, *pathos* merupakan kekuatan yang dimiliki oleh komunikator dalam mengendalikan emosi pendengarnya, sedangkan *logos* ialah kekuatan yang dimiliki oleh seorang komunikator melalui argumentasinya.

Faktor lain yang penting dimiliki oleh seorang komunikator adalah daya tarik (*attractiveness*). Ketika dikaitkan dengan penanganan bencana tentu daya tarik sangat berpengaruh bagi jajaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun masyarakatnya. Sebab, daya tarik pada umumnya disebabkan karena cara penyampaian secara santun, murah senyum, cara berpakaian yang apik dan *necis*, dan ketegasan dalam bercakap.

2) Menetapkan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak

Dalam studi komunikasi masyarakat biasanya diistilahkan dengan sebutan khalayak (*audience*), sementara dalam dunia politik disebut publik. Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran program komunikasi merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas komunikasi diarahkan kepada mereka. Merekalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu program, sebab bagaimana pun besarnya biaya waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk memengaruhi mereka, namun jika mereka tidak tertarik pada program yang ditawarkan, maka kegiatan komunikasi yang dilakukan akan sia-sia.

Masyarakat sebagai makhluk sosial, sangat peka dengan hal-hal yang bersifat persuasif, propaganda, agitasi, dan perang urat syaraf. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki kebebasan untuk memilih yang terbaik menurut fikiran dan pengalamannya. Di depan kita mungkin saja bisa mengatakan “ia” akan memilih yang kita tawarkan dalam artian tidak ingin mengecewakan seseorang, tetapi ketika hal tersebut mungkin saja “tidak” akan terealisasikan tanpa diketahui siapa pun. Tapi, disisi lain, sebagai manusia pasti memiliki rasa cinta dan keinginan untuk bersama dengan orang lain. kebutuhan untuk hidup bersama dan bergabung dengan kelompok lain menjadi kebutuhan dalam bermasyarakat.

Dalam buku perencanaan dan strategi komunikasi (Cangara, 2017), masyarakat ada kelompok-kelompok yang menentukan besarnya pengaruh suatu program, diantaranya:

- a. Kelompok yang memberi izin, yaitu suatu lembaga atau badan (pemerintah) yang membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program disebarluaskan
- b. Kelompok pendukung (jajaran forkopimda, BPBD) ialah kelompok yang mendukung dan setuju pada program yang akan dilaksanakan.
- c. Kelompok oposisi, yang merupakan mereka yang menentang atau bertentangan dengan ide perubahan yang ingin dilakukan.
- d. Kelompok evaluasi, mereka yang terdiri dari orang-orang yang mengkritisi dan memonitor jalannya suatu program. Seperti legislatif yang terus memantau pelaksanaan program, sejauhmana manfaat dan efeknya terhadap masyarakat.

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan kelompok, maka masyarakat sering dikelompokkan menurut segmentasi. Misalnya ada kelompok masyarakat yang hidup dengan mata pencaharian sebagai

petani, maka ia menjadi segmentasi petani. Ada kelompok masyarakat yang hidup dengan gaji sebagai pegawai pemerintah maka akan menjadi segmentasi pegawai, demikian pula ada segmentasi menurut agama, minat, pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain. Untuk mengetahui dan memahami segmentasi masyarakat tersebut, para peneliti sering kali memulai dengan memetakan (*scanning*) karakteristik masyarakat. Ada tiga cara yang bisa digunakan untuk memetakannya, yakni (Cangara, 2017):

- a. Aspek sosiodemografik, mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tingkat pendapatan (*income*), agama, ideologi, etnis, termasuk kepemilikan media.
- b. Aspek profil psikologis, mencakup sikap yang tercermin dari kejiwaan masyarakat, misalnya temperamen, tenang, sabar, terbuka, emosional, tidak sabar, dendam, antipati, terus terang, tertutup berani, dan penakut.
- c. Aspek karakteristik perilaku masyarakat, mencakup kebiasaan-kebiasaan yang dijalani dalam kehidupan suatu masyarakat. Misalnya agamis (*relegius*), santun, suka pesta, dan mabuk-mabukan, tenggang rasa (*tepo sliro*), pelit dan ekonomis (serba perhitungan), *individualism*, jujur dan bertanggung jawab.

3) Teknik Menyusun Pesan

Pada hakikatnya pesan merupakan segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna. Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi. Mulai dari simbol yang sederhana seperti bunyi, isyarat, dan warna sampai pada simbol-simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya. Melalui radio, televisi, *telegram*, *telex*, dan satelit.

Menurut bentuknya, simbol yang disampaikan dapat dibedakan atas dua macam, yakni simbol verbal dan non verbal. Simbol verbal yang dimaksud yaitu dengan menggunakan bahasa yang mana bahasa merupakan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti dan dapat membantu dalam menyusun struktur pengetahuan menjadi logis dan mudah dimengerti oleh orang lain. Bagaimanapun bagus sebuah ide, kalau tidak disusun menurut struktur bahasa yang benar dengan sendirinya maka ide yang baik akan menjadi kacau. Tanpa bahasa manusia sulit untuk berfikir, bahasalah yang memengaruhi persepsi dan pola berfikir seseorang.

Pesan sangat tergantung pada program yang akan disampaikan. Dalam artian jika program itu bersifat komersil untuk mengajak orang agar mau mengikuti program tersebut, maka pesan yang harus disampaikan harus bersifat persuasif dan propokatif, sedangkan jika program tersebut merupakan suatu penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat maka sifat dari pesan tersebut harus persuasif dan edukatif. Tetapi jika pesan yang disampaikan harus untuk sekadar diketahui oleh masyarakat maka sifat pesannya harus bersifat informatif. Pesan yang bersifat informatif sebenarnya harus melekat pada semua jenis program apakah itu komersil, politik, penyuluhan, dan informasi publik, sebab sebuah pesan yang tidak memiliki nuansa informatif bisa menimbulkan kesalahan persepsi. Maka,

ada tiga teori yang membicarakan tentang penyusunan pesan, yakni (Cangara, 2017):

- a. *Over power'em theory*. Teori ini menunjukkan bahwa bila pesan sering kali diulang, panjang dan cukup keras, maka pesan itu akan berlalu dari khalayak
- b. *Glamour theory*. Suatu pesan (ide) yang dikemas dengan cara cantik, kreatif, inovatif, kemudian ditawarkan dengan daya persuasi, maka khalayak akan tertarik untuk memiliki ide tersebut.
- c. *Don't tele'em theory*. Bila suatu ide tidak disampaikan kepada orang lain, maka mereka tidak akan memegangnya dan menanyakannya. Karena itu mereka tidak akan membuat pendapat tentang ide tersebut.

Selain itu, terdapat juga teknik penyusunan pesan dalam bentuk (1) *one-side issue*, yaitu teknik penyampaian pesan yang menonjolkan sisi kebaikan atau keburukan sesuatu. Dalam artian seorang komunikator dalam menyampaikan sesuatu harus memberi tekanan apakah pada kebaikannya atau sebaliknya pada keburukannya. Teknik penyampaian pesan seperti ini hanya cocok untuk mereka yang kurang berpendidikan, sehingga tidak mempunyai alternatif pilihan. (2) *Two-side issue*, yaitu teknik penyampaian pesan di mana komunikator selain mengemukakan yang baik-baik, juga menyampaikan hal yang kurang baik. Komunikator memberi kesempatan kepada khalayak untuk berfikir apakah ada keuntungan jika melaksanakan informasi yang diterimanya. Biasanya teknik seperti ini lebih cocok disampaikan kepada khalayak yang berpendidikan dan bersikap kritis. Untuk mengelola dan menyusun pesan yang mengena dan efektif perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu (Cangara, 2017):

- a. Harus menguasai lebih dahulu pesan yang disampaikan, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis.
- b. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis, untuk itu harus mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan.
- c. Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa (*vocal*) serta gerakan-gerakan tubuh yang dapat menarik perhatian pendengar.
- d. Memiliki kemampuan untuk membumbui pesan berupa humor untuk menarik perhatian dan mengurangi rasa bosan pendengar.

Selain simbol verbal, maka tidak kalah pentingnya adalah penggunaan simbol non verbal. Simbol non verbal biasa disebut bahasa isyarat, bahasa tubuh (*body language*) atau bahasa diam (*silent language*). Simbol non verbal yang digunakan dalam berkomunikasi sudah lama menarik perhatian para ahli antropologi dan linguistik, bahkan dalam bidang kedokteran. Dalam pesan tentu terdapat teknik penyampaian pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan mendidik, yang akan diuraikan di bawah ini (Cangara, 2017):

- a. Pesan bersifat informatif, dalam kehidupan sehari-hari informasi sering kali dikaitkan dengan makna berita, penerangan, dan pengetahuan. Sifat informasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni informasi bersifat aktual dan informasi bersifat umum. Aktual yang dimaksud yaitu ditandai dengan “kebaruan” terkait perkembangan terkini penanganan bencana, sementara yang bersifat umum digolongkan dalam kategori publikasi, seperti seminar, atautkah berita kunjungan ke lokasi bencana.
- b. Pesan bersifat persuasif, semua kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam hubungan antara manusia memiliki tujuan. Penyusunan pesan yang bersifat persuasi memiliki sebuah proposisi, yakni adanya hal yang diperoleh sumber dari penerima atas pesan yang disampaiannya. Dalam artian setiap pesan yang dibuat diharapkan akan menghasilkan perubahan tingkah laku, sikap, dan pengetahuan terkait bencana, baik itu pesan yang menakutkan, pesan penuh emosi (diskriminasi), pesan penuh

janji-janji, pesan yang penuh dorongan (motivasi), dan pesan yang penuh humor.

- c. Pesan yang bersifat mendidik (edukatif), jika pesan informatif tekanannya pada unsur kognitif, maka pesan yang bersifat mendidik punya tekanan pada unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik terkait edukasi akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.

4) Memilih Media atau Saluran Komunikasi

Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan, dan jenis media yang dimiliki oleh khalayak. Isi pesan yang dimaksud yaitu kemasan pesan yang ditujukan untuk masyarakat luas dan kemasan pesan untuk komunitas tertentu. Untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa misalnya surat kabar atau televisi, dan untuk komunitas tertentu digunakan media selebaran atau saluran komunikasi kelompok.

Sebenarnya dalam menentukan jenis media yang akan digunakan, sering kali terjadi pegeseran. Hal ini disebabkan perkembangan media itu sendiri selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu secara cepat. Misalnya media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio dan tv) media luar ruangan dan media tradisional sudah digolongkan sebagai media lama (konvensional), sedangkan internet dan telepon seluler (*handphone*) digolongkan sebagai media baru (*new media*). Maka akan diuraikan di bawah ini (Cangara, 2017):

- a. Media cetak yang merupakan saluran komunikasi di mana pesan-pesan verbalnya (tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar dilakukan dalam bentuk tercetak yang dapat terbaca.
- b. Media elektronik yang mana pesan-pesannya disampaikan melalui getaran listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu (radio dan televisi),
- c. Media luar ruangan (*Outdoor Media*) yang biasa dikaitkan dengan dunia estetika dalam bentuk lukisan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang ramai dilihat oleh banyak orang (spanduk, baliho, reklame, dimobil atau kereta, *electronic board*, bendera, umbul-umbul).
- d. Media format kecil yang biasanya terdiri atas berbagai macam media, tetapi bentuknya lebih kecil, dan isinya terkadang terfokus pada satu macam informasi (buletin, selebaran, brosur, poster, kalender, stiker, lencana, kaos oblong, dasi, *blacknotes*, payung, topi, dan sebagainya)
- e. Saluran komunikasi kelompok (arisan atau pengajian, perkawinan, pesta panen, rukun kampung, asrama, sekertariat),
- f. Saluran komunikasi publik yang dapat dikatakan komunikasi secara tatap muka, terbuka dan langsung biasanya dalam bentuk (kampanye, rapat akbar, rumah ibadah, turnamen olahraga),
- g. Saluran komunikasi antarpribadi merupakan suatu bentuk komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, tetapi karena pesan-pesannya sangat *privacy* dan tidak boleh didengar oleh orang lain kecuali mereka berdua yang terlibat langsung dalam komunikasi (melalui surat, telepon, sms, anggota keluarga, teman dekat, sahabat, dan teman kantor),
- h. Saluran komunikasi tradisional, saluran ini banyak ditemukan di daerah pedalaman yang masih kental dengan sistem adat (pesta adat, upacara kematian, pesta panen, upacara perdamaian dan sebagainya).
- i. Saluran media baru (*new media*), seperti telepon dan sms, selain itu media baru tersebut muncul pada tahun 1990 yang menggambarkan munculnya teknologi interaktif dan komunikasi jejaring (*network communication*), khususnya internet yang akan mengubah kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi

Media massa dapat bertindak sebagai agen pendukung operasional manajemen suatu departemen atau paling jauh sebagai rekan pemerintah dalam menghadapi bencana yang akan, sedang dan telah terjadi.

Penanganan informasi bencana yang dilakukan media pun, pada kapasitas media sebagai sumber informasi harus mengacu pada strategi nasional penanganan bencana karena ketidakakuratan informasi berpeluang menciptakan bencana baru dalam bencana yang tengah terjadi.

Perlu diingat bahwa periode pasca bencana jauh lebih panjang dari peristiwa bencana yang terjadi. Faktor tersebut dapat membuat media massa berperan dalam membangun dialog agar proses pemulihan pasca bencana berlangsung dengan cepat dan mampu membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Penyampaian informasi dan manajemen bencana yang cepat juga dapat dilakukan melalui komunikasi yang menggunakan media baru, seperti seluruh aset media digitalisasi.

5) Penyebarluasan Media Komunikasi

Penyebaran media sangat menentukan keberhasilan suatu program, sebab jika tidak selain akan membuang waktu dan tenaga juga bisa menjadi pemborosan dari segi uang. Penyebaran media pada prinsipnya berbeda satu sama lain, tergantung dari sifat, karakteristik dan jangkauan media itu sendiri. Misalnya penyebaran media cetak tidak sama dengan penyebaran dengan media elektronik, demikian penyebaran media elektronik tidak sama dengan media luar ruangan dan media format kecil.

Berbeda dengan media televisi, perencana komunikasi harus mengetahui *prime time* dan kemampuan jangkauan siaran ke wilayah mana saja bisa diterima, sebab tidak semua stasiun televisi di Jakarta dapat diterima di daerah. Seorang perencana komunikasi sedapat mungkin bisa

memanfaatkan peluang untuk mengisi ruang-ruang publik yang tersedia di media elektronik seperti TV, Misalnya *talkshow*, liputan program, interaktif dan semacamnya. Demikian juga dengan media radio, perlu ia meminta kepada reporter untuk mewawancarainya tentang hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Seorang perencana komunikasi yang cerdas dan profesional harus mampu menggunakan media setiap saat, kapan dan di mana pun.

Untuk media luar ruangan seperti spanduk, baliho, reklame, bendera, dan umbul-umbul, penempatannya harus pada lokasi yang bisa menarik perhatian orang yang lalu lalang. Persoalan yang bisa muncul yakni adanya aturan dari Dinas kebersihan dan Tata Kota agar penempatan media luar ruang sedapat mungkin tidak mengurangi keindahan kota.

6) Menganalisis Efek Komunikasi

Semua program komunikasi yang dilakukan mempunyai tujuan, yakni memengaruhi target khalayak. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang difikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh sangat penting dalam proses komunikasi. Tujuannya untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Pengaruh dapat dikatakan mengenai jika pengaruh (P) yang terjadi pada penerima informasi sama dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator atau sumber (P=T) atau dengan kata lain pengaruh (P) yang dihasilkan oleh proses komunikasi

sangat ditentukan oleh Sumber, Pesan, Media, dan Penerima atau dengan formula ($P=S/Ps/M/Pn$)

Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (*knowledge*) sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*). Pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat (*opinion*). Adapun yang dimaksud dengan perubahan sikap, adalah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisasi dalam bentuk prinsip, sebagai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap suatu objek. Dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan atau ideologi, orang berubah sikap karena melihat bahwa apa yang tadinya dipercaya tidak benar. Oleh karena itu ia berubah sikap untuk mengganti kepercayaannya. Sementara yang dimaksud dengan perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan. Ada empat macam efek perubahanyang bisa ditimbulkan sebuah gagasan, yakni (Cangara, 2017):

- a. *Turbulent*, yaitu suatu perubahan yang begitu cepat dan luas dalam suatu lingkungan yang memerlukan perencanaan jangka pendek yakni antara 1-2 tahun.
- b. *Unstable*, yaitu cepat tapi perubahannya kecil sehingga penanganannya memerlukan perencanaan untuk 2-3 tahun.
- c. *Transitional*, yakni lambat tetapi perubahannya luas sehingga diperlukan perencanaan untuk jangka waktu 3-5 tahun.
- d. *Stable*, yaitu lambat dan perubahan yang ditimbulkan kecil sehingga perencanaan diperlukan untuk jangka waktu 5-20 tahun.

Dari berbagai studi yang pernah dilakukan terhadap pengaruh dalam komunikasi, ditemukan bahwa komunikasi massa lebih banyak

berpengaruh terhadap pengetahuan dan wawasan seseorang, sedangkan komunikasi antarpribadi cenderung berpengaruh pada sikap dan perilaku. Studi yang sama juga pernah dilakukan pada 1930-an dengan temuan bahwa mendengar pidato langsung di lapangan terbuka (komunikasi publik) cenderung membakar emosional pendengar dari pada melalui radio. Demikian juga halnya studi Lazarsfeld dan Elihu Katz di Eric Country Iowa (AS) ditemukan bahwa kontak pribadi (komunikasi antarpribadi) lebih tinggi pengaruhnya dalam mengajak seseorang untuk memilih dari pada melalui media massa (komunikasi massa). Disisi lain sesudah televisi tampil sebagai primadona dalam 5 dekade terakhir ini, ditemukan bahwa ternyata televisi lebih efektif dalam memengaruhi perilaku masyarakat.

7) Mobilisasi Kelompok Berpengaruh

Dalam berbagai program komunikasi, apakah itu penyadaran masyarakat, pemasaran, promosi, kampanye politik, selain dilakukan dalam bentuk media maka mobilisasi massa juga perlu dilakukan. Mobilisasi dilakukan dengan menggerakkan masyarakat untuk bisa mengerti, memahami, dan menerima program-program yang ditawarkan. Untuk menggerakkan atau memobilisasi masyarakat tentu tidak mudah, apalagi dalam situasi seperti ini yang penuh dengan keterpurukan akibat bencana di mana orang merasa sudah tidak terlalu bergantung pada orang lain. kekhawatiran yang hadir sikap individualisme dan kapitalisme lebih menonjol ketimbang solidaritas kelompok atau kaum sosialis.

Namun di beberapa negara sedang berkembang di Asia khususnya negara Indonesia masih ditemui warga dalam mengambil keputusan masih bergantung pada tokoh-tokoh formal dan informal, terutama mereka yang masih tinggal di daerah pedesaan. Di mana warga memiliki hubungan yang sangat erat dengan para tokoh-tokoh formal dan informal tersebut. Seperti halnya tokoh formal camat, kepala desa, kepala dusun, ketua RT/RW. Sedangkan tokoh informal seperti imam desa, guru, tetua adat, punggawa, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri tokoh masyarakat yang terdapat di daerah pedesaan, antara lain (Cangara, 2017):

- a. Lebih berpendidikan
- b. Lebih tinggi status ekonominya
- c. Diterpa oleh media komunikasi
- d. Kosmopolit
- e. Inovatif
- f. Memiliki partisipatif sosial yang tinggi
- g. Memiliki kontak dengan agen pembaharuan (komunikator pembangunan)
- h. *Concern* dengan sistem budaya setempat
- i. *Homophily* dengan lingkungan masyarakatnya.

Untuk menggerakkan masyarakat agar dapat menerima program-program yang dikomunikasikan, maka peran tokoh masyarakat sangat penting. Seorang perencana komunikasi yang profesional akan mengetahui dan bisa menghubungi para tokoh masyarakat ini untuk memperoleh dukungan terhadap program yang ditawarkan. Ada beberapa saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan atau memobilisasi massa, antara lain (Cangara, 2017):

- a. Saluran komunikasi publik dengan cara memobilisasi massa untuk menghadiri rapat koordinasi.

- b. Saluran komunikasi sosial melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dalam media baru bisa digunakan *Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Digital Art, Youtube, dan Website*.
- c. Saluran komunikasi antar pribadi misalnya surat, telepon, sms, sahabat maupun kerabat.

Setiap proses penanganan bencana selalu melibatkan peran komunikasi, baik komunikasi interpersonal, kelompok, organisasi, publik, media massa, media interaktif, dan komunikasi lintas budaya. Komunikasi sebagai manajemen, artinya komunikasi yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat menjadi dasar pelaksanaan tindakan tertentu. Komunikasi sebagai sarana sosialisasi, artinya komunikasi yang dilancarkan akan menyadarkan orang lain tentang berita tertentu.

8) Evaluasi Komunikasi

Evaluasi dapat dikatakan sebagai metode pengkajian dan penilaian keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang ingin dicapai sebelumnya. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur sejauhmana keberhasilan suatu program. Kegiatan komunikasi dapat dilakukan bertitik tolak dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah tercapai atau tidak, atau apakah tingkat pencapaiannya cukup tinggi atau rendah. Evaluasi dapat dilakuka dengan dua cara, yakni evaluasi program dan evaluasi manajemen (Cangara, 2017) .

- a. **Evaluasi Program**, yang biasa disebut dengan evaluasi sumatif (*summative evaluation*), di mana evaluasi ini memiliki fokus untuk melihat: sejauhmana tujuan akhir yang ingin dicapai (*goal*) dari

suatu kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak, untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi.

- b. **Evaluasi Manajemen**, yang biasa disebut dengan evaluasi formatif (*formative evaluation*). Evaluasi ini memiliki fokus terhadap pencapaian operasional kegiatan, seperti: apakah hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang telah ditetapkan, apakah pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, apakah usaha yang dilakukan mengalami kemajuan atau tidak, dan bagaimana mengatasi suatu hambatan.

Oleh sebab itu, tujuan strategi komunikasi yang dikemukakan oleh R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam buku yang berjudul *Techniques for Effective Communication*, dikutip dari (Hutomo, 2017), yaitu yang pertama adalah *to secure understanding*, memastikan bahwa penerima pesan mengerti pesan yang diterimanya, dan apabila sudah menerima dan dapat mengerti, maka yang diterima tersebut itu harus dibina (*to establish acceptance*). Yang pada akhirnya setelah di mengerti, kemudian atau dibina, maka selanjutnya kegiatan dimotivasi (*to motivate action*), bahkan fungsi dari strategi komunikasi salah satunya yaitu proses menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan edukatif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.

3. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi Pasca bencana

Menurut Sumardi (Basrowi & Juariyah, 2010), Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban

yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Kondisi sosial ekonomi juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Manaso Malo juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yaitu, merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Sementara W.S Winke, menyatakan bahwa pengertian status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup, dan kurang (Basrowi & Juariyah, 2010).

Pada hakikatnya sosial ekonomi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Istilah sosial menurut arti kata memiliki arti mengenai hubungan kemasyarakatan dalam usaha menunjang pembangunan. Sedangkan kata ekonomi menurut asal katanya berarti aturan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan praktis hidupnya. (Muttalib & Mashur, 2019).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling kenal mengenal antar satu dengan yang lain, paguyuban, sifat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Kehidupan sosial masyarakat Desa Srigading terdiri dari interaksi sosial, nilai sosial, dan tingkat pendidikan, sedangkan gambaran kehidupan ekonomi masyarakat terdiri dari kepemilikan rumah tempat tinggal, luasnya tanah garapan atau tanah yang dimilikinya.

Kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Menurut Dalyono (Muttalib & Mashur, 2019), kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Kondisi sosial yang mempengaruhi individu dijelaskan Dalyono melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman, pekerjaan dan bencana. Sedangkan secara tidak langsung melalui media masa baik cetak, audio maupun audio visual. Menurut Imas Kurnia (Yunida, 2017) yang menjelaskan bahwa kondisi sosial penduduk adalah keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia yang mempunyai nilai sosial, sehingga hal tersebut dikaji melalui empat variabel yaitu kondisi demografis, kesehatan, pendidikan dan kondisi rumah:

- a. Kondisi Demografis, yang termasuk istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu berarti studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya terkait dengan bahaya suatu bencana.
- b. Kesehatan, dapat dinyatakan suatu kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pelayanan yang bersifat publik (*public good*) masyarakat minimal yang bisa dilakukan meliputi upaya kesehatan wajib, yaitu: promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- c. Pendidikan, mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- d. Kondisi Rumah, di mana merupakan suatu kebutuhan pokok di samping sandang dan pangan. Rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah yang sehat dan nyaman ialah bangunan tempat kediaman suatu keluarga yang lengkap berdiri sendiri, cukup awet dan cukup kuat rekonstruksinya. Kondisi rumah penduduk dalam penelitian ini adalah suatu kriteria yang akan menunjukkan tingkat kerusakan rumah dengan cara menilai unsur-unsur fisik rumah. Unsur-unsur tersebut meliputi keadaan atap, dinding, lantai, kamar mandi dan WC.

Sedangkan, menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (Basrowi & Juariyah, 2010), menjelaskan bahwa kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh mereka pembawa status. Namun, di sisi lain kondisi ekonomi penduduk juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga kondisi ekonomi dapat ditinjau melalui tiga variabel diantaranya (Yunida, 2017):

- a. Mata pencaharian, suatu aktivitas dalam melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu, dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi.
- b. Pendapatan, kondisi di mana penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun sektor nonformal dan penghasilan subsistem yang dihitung dalam jangka waktu tertentu yang diterima oleh anggota masyarakat maupun pemerintah pada jangka waktu tertentu baik berupa uang maupun barang. Disisi lain terdapat pula pendapat daerah yang kiranya dapat memengaruhi kondisi sebuah wilayah, karena baik buruknya

pembangunan suatu daerah tergantung sejauhmana proses pengelolaan pendapatan daerah.

- c. Kepemilikan Barang Berharga, dapat diartikan sebagai pemilikan sejumlah barang yang dinilai oleh penduduk sebagai barang berharga. Barang berharga tersebut meliputi mobil, sepeda motor, televisi atau radio atau tape, handphone dan perabotan lainnya yang dianggap penduduk sebagai barang berharga. Barang berharga dalam penelitian ini selain berupa barang-barang juga dinilai dari kepemilikan hewan ternak dan penguasaan lahan sawah.

Manusia adalah mahluk sosial, kehadirannya dalam kehidupan satu sama lain saling berhubungan dan membutuhkan antar sesamanya. Artinya, ada keterkaitan antara individu satu dengan individu yang lainnya dalam kehidupan. Menurut Max Weber (Muttalib dan Mashur, 2019) menjelaskan bagaimana suatu tindakan individu (*personal*), dapat memiliki makna dan arti jika memiliki tujuan (*objek*) yakni keberadaan orang lain. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terjadi akibat faktor baik yang berasal dari dalam (*internal*) dan dari luar (*eksternal*) dan dalam waktu singkat dapat merubah perilaku dan tindakan sosial ekonomi kehidupan masyarakat. Akibat dari faktor tersebut menyebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam kondisi terpuruk termasuk jika siklus pergerakan bumi yang dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan sering terjadinya bencana alam, sebagaimana yang dialami Kecamatan Masamba dan Baebunta, dan sebagian wilayah Kabupaten Luwu Utara yang terdampak bencana.

Oleh karena itu, menurut Yayuk Yuliati (Basrowi & Juariyah, 2010), menjelaskan kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan

kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok di mana kebiasaan hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan *culture activity*, kemudian juga menjelaskan pula bahwa dalam semua masyarakat di dunia baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antara individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status kriteria dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana, karena disamping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-orang yang dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah maupun ragamnya.

4. Stakeholders dalam penanganan Bencana

Bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, iklim yang tidak menentu seringkali berdampak pada terjadinya bencana alam yang datang dengan tiba-tiba. Di Indonesia pada umumnya merupakan wilayah rawan bencana alam, hampir disetiap tahun di setiap daerah mengalami berbagai bencana alam (Suleman dan Apsari, 2017). Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

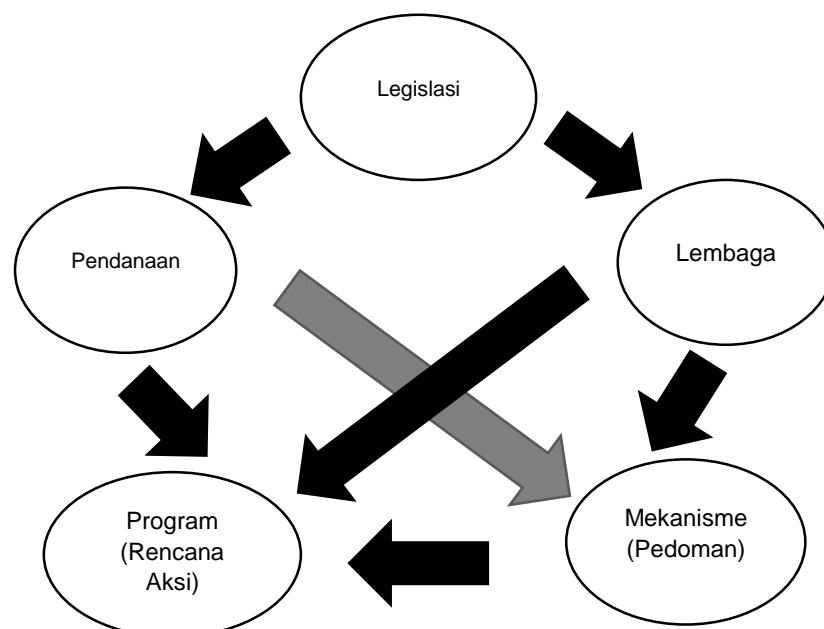
Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, hutan, dan lainnya merupakan sumber daya yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan sumber daya alam ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberi kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, hadirnya bencana alam memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat, bahaya yang ditimbulkan sangat tidak dapat diperkirakan, bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Banjir merupakan bencana dengan jumlah kejadian yang sangat besar serta menyebar di hampir seluruh wilayah. Banjir adalah limpahan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpah dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai.

Banjir disebabkan oleh curahan hujan yang berlebih sehingga menyebabkan sungai meluap ke daratan. Tidak adanya daerah resapan yang disebabkan oleh hutan gundul, penyempitan serta pendangkalan sungai memengaruhi arus air sungai dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan bencana banjir. Bukan hanya itu, sistem irigasi yang tidak baik serta penyumbatan oleh sampah pada aliran sungai dan irigasi membuat aliran air menjadi terhambat, hal ini merupakan fenomena ulah dari manusia yang tidak menjaga lingkungan sekitar dengan baik.

Selama ini upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah hanya terfokus pada tahapan *emergency response* (tanggap

darurat) yang biasanya berlangsung selama 7-14 hari. Antisipasi sebelum bencana tidak begitu difokuskan, padahal kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam tahapan *pra-disaster* juga sangat penting karena mampu meminimalisir korban jiwa dan harta benda. Maka gambar 2.4 dibawah ini akan menggambarkan sistem penanggulangan bencana di Indonesia:

Gambar 2.4 Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia



Sumber: Komunikasi Bencana
(Susanto dkk., 2011)

Berdasarkan gambar di atas, keterpaduan kebijakan dalam penanganan bencana dapat dilihat dari penerapan sistem, seperti di negara Jepang bencana yang rutin menimpa negara Jepang sejak zaman dulu membuat pemerintahnya belajar untuk mengatasinya secara komprehensif. Belajar dari pengalaman pahit di masa lalu, undang-undang bencana alam di Jepang mewajibkan setiap kepala instansi untuk mengambil langkah

yang diperlukan dalam menghadapi bencana. Setiap proses dan setiap kebijakan pembangunan harus selalu diikuti oleh aspek penanggulangan bencana alam. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya

Upaya penanganan bencana harus jauh sebelum bencana terjadi untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi. Tentu saja penanganan bencana selama terjadinya bencana juga penting untuk segera menolong korban bencana, sementara tahap setelah bencana menjadi fase pemulihan terhadap korban dan kondisi sosial ekonomi daerah setempat. Indonesia sendiri telah memiliki beberapa peraturan tentang penanganan bencana yang telah diatur dalam Undang-undang, yaitu (Khambali, 2017):

- a. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (mengatur berbagai hal mengenai penanganan bencana di Indonesia)
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (termasuk di dalamnya tentang kriteria bencana, perencanaan manajemen bencana, identifikasi resiko bencana, dan analisis resiko bencana)
- c. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- d. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
- e. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Di dalam suatu masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan meminta nasehat anggota masyarakat

lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Orang-orang tersebut mungkin menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku secara informal. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain seperti itu disebut tokoh masyarakat, pemuka pendapat, pemimpin informal atau sebutan lainnya yang sejenis.

Pemberdayaan komunikasi dalam penanganan bencana dipengaruhi secara nyata oleh keragaman kelompok masyarakat. Penanganan bencana merupakan kegiatan yang mensinergikan program pemerintah dan partisipasi masyarakat korban bencana, sehingga faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan program penanganan bencana di masyarakat. Peran *stakeholders* dan pemuka pendapat juga diperlukan dalam kegiatan penanganan bencana yang biasanya cenderung partisipatif dan melibatkan banyak pihak dalam masyarakat.

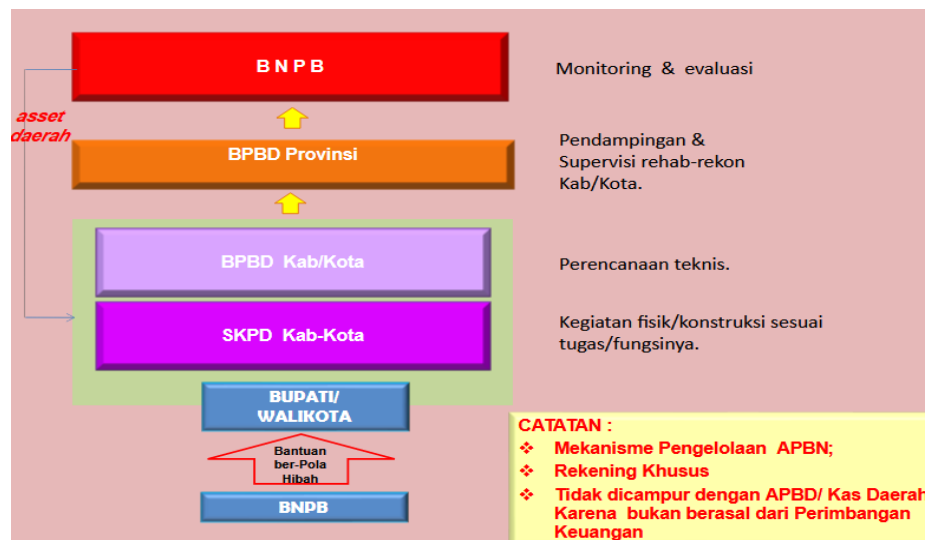
Secara umum dalam penanggulangan bencana tentu terdapat berbagai macam aktivitas baik itu tanggap darurat ataupun penanganan pasca bencana. Setiap terjadi bencana, negara senantiasa hadir dan melakukan berbagai tindakan penanganannya. Di mana keterlibatan aparat keamanan, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan para relawan dalam penanganan korban bencana sedikit banyak telah mengurangi beban penderitaan yang mesti ditanggung para korban bencana. Namun demikian, untuk memastikan agar korban bencana benar-benar memperoleh pelayanan dan penanganan terbaik, tentu yang

dibutuhkan bukan sekadar sikap reaktif, melainkan koordinasi penanganan yang benar-benar terpadu.

Tujuan penanganan bencana adalah bagaimana mendukung upaya pemulihan pasca terjadinya bencana dapat berjalan efektif dan masyarakat segera pulih kembali dari trauma. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang menjadi korban bencana dapat kembali berkembang, tanpa harus terlalu lama terpuruk dalam penderitaan karena kehilangan harta benda dan sanak keluarga (Susanto dkk., 2011). Masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana sudah tentu perlu secepatnya ditindak lanjuti dan dilakukan pemulihan secara berkala. Lebih dari sekadar menyediakan tenda-tenda penampungan di tempat pengungsian, masyarakat yang menjadi korban bencana, terutama yang kehilangan harta benda dan aset produksinya, mereka tentu membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk memastikan kemungkinan bangkit kembali dari keterpurukan.

Cara pemimpin dalam menangani bencana secara tepat juga sangat dibutuhkan karena bencana yang berbeda memengaruhi cara-cara penanganannya, terutama pada tahap pasca bencana. Bencana yang muncul semata-mata dari alam akan berbeda penanganannya dengan bencana transportasi yang memiliki dampak sangat berbeda terhadap para korban. Maka gambar di bawah ini akan memberikan gambaran mengenai pembagian tugas dan fungsi baik itu Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana:

Gambar 2.5 Pembagian Peran dan Tugas



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa BNPB sebagai lembaga penanggulangan bencana terus melakukan sinergitas dengan Pemerintah setempat, dengan tujuan membangkitkan kembali tata kelola kehidupan masyarakat pada kondisi awal. Dalam perspektif liberal, kehadiran Pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keagamaan. Sedangkan perspektif sosialis, mengatakan penetrasi Pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa keperluan individu dan masyarakat mutlak dibutuhkan.

Selain itu, manajemen bencana sangat perlu untuk ditingkatkan, khususnya pada bencana banjir, data BNPB menyebutkan sepanjang tahun 2016 bencana banjir merupakan bencana alam yang paling banyak menelan korban jiwa serta berdampak pada kerusakan rumah maupun fasilitas umum. Dampak bencana banjir sangatlah besar, oleh sebab itu manajemen bencana yang baik harus segera diterapkan. Menurut Carter

(Suleman dan Apsari, 2017) penanggulangan bencana alam (*disaster management*) perlu diselenggarakan melalui tahap-tahap: Persiapan (*preparation*), Penghadangan/penanganan (*Facing disaster*), Perbaikan akibat kerusakan (*reconstruction*), Pengfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak (*Rehabilitation*), dan Penjinak gerak alam yang menimbulkan bencana (*Mitigation*).

Pemerintah selaku komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat), dan serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak bahkan berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pemerintah baik dalam jangka panjang maupun pendek. Mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan bahwa sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Maka terdapat tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu (Kurniawan, 2017):

- a. Fungsi pengaturan, dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah juga

- mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.
- b. Fungsi pelayanan, yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan Pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar Negeri, moneter, dan peradilan. Secara umum pelayanan Pemerintah mencakup pelayanan publik (*public service*) dan pelayanan sipil (*civil service*) yang menghargai kesetaraan.
 - c. Fungsi Pembangunan, pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.
 - d. Fungsi pemberdayaan, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah. Dalam fungsi ini Pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Penanganan bencana yang mengacu kepada peraturan, jika ditinjau dari aspek legal, memang dapat dipertanggungjawabkan. Namun nuansa birokratis yang berbelit-belit, tetap tidak bisa dihindari. Karena itu, mengingat aspek legal wajib dijalankan, sedangkan penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat, maka

merupakan salah satu jalan untuk mendukung penanganan bencana yang eskalasinya meningkat. Indonesia merupakan Negara yang menarik untuk ditelaah berkaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu ide dasar dan cita-cita dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

“Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga, diharapkan Negara dapat berperan aktif dalam menciptakan situasi atau kondisi tersebut. Sedangkan ketika melihat dari sisi wilayah Indonesia yang merupakan Negara yang berpotensi rawan akan bencana baik secara geografis, geologi maupun sosio-demografis. Maka, interaksi antara kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana menjadi sangat penting karena berbagai bencana yang kerap melanda Indonesia (Aryo dan Lubis, 2014). Dalam UU No. 11 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1, tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa:

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Melihat kondisi sosial masyarakat dapat diamati dari beberapa indikator diantaranya, umur, pekerjaan, jenis kelamin, keluarga, dan

keanggotaan dalam organisasi. Sehingga sosial merupakan suatu hal yang ingin dicapai, dihasilkan bahkan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga, negara, dan juga Pemerintahannya. Selain itu krisis ekonomi merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kerentanan bencana. Hal tersebut dikarenakan apabila perekonomian suatu daerah tidak stabil akibat bencana, maka akan sulit bagi masyarakat untuk mampu memulihkan sektor ekonomi mereka. Bencana alam menyedot begitu banyak sumber daya untuk membangun kembali wilayah yang terdampak kerusakan.

B. Kajian Teori

1. Teori Perencanaan Komunikasi John Middleton

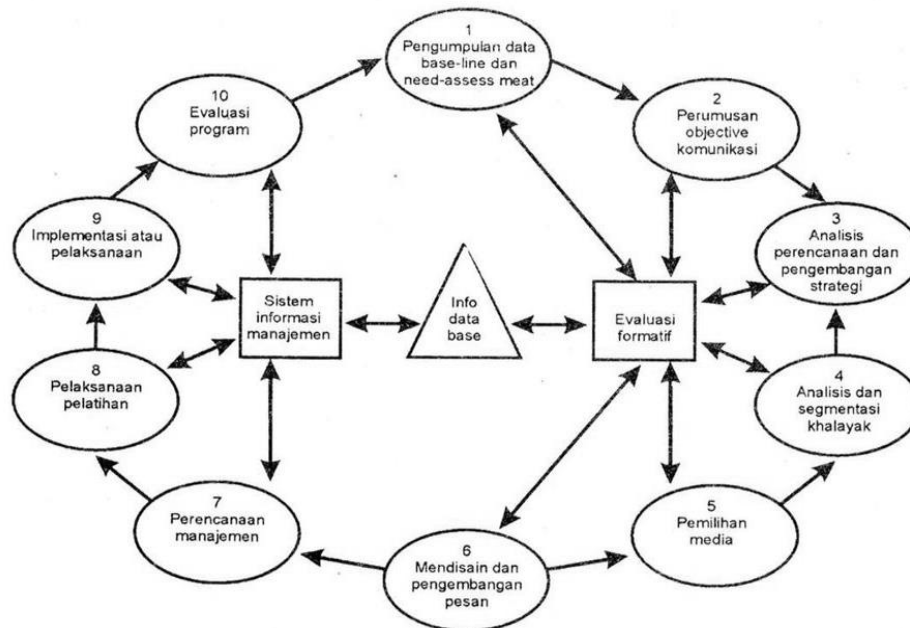
Mengetahui bahwa pentingnya komunikasi dan informasi bagi masyarakat dalam upaya memberikan edukasi terkait penanganan bencana. Dalam konteks peringatan dini membuat masyarakat memiliki peningkatan kewaspadaan terhadap bencana. Pesan yang selama ini digunakan juga termasuk pada domain informasi. Sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah dalam membangun jaringan komunikasi berbasis teknologi, tetapi masih saja terdapat permasalahan kecil yang sulit untuk dihindarkan. Dalam upaya meminimalisir penyebaran kebohongan informasi, maka hal yang harus menjadi pegangan yaitu sosialisasi kepada khalayak.

Model dari Middleton dapat di implementasikan untuk kampanye sosial, baik bersifat nasional maupun daerah. Misalnya kampanye tentang bahaya pencemaran lingkungan, kependudukan, peningkatan produksi tanaman pangan, gerakan mencintai produksi dalam negeri, kesadaran membayar pajak, dan sebagainya. Model yang dibuat Middleton ini lebih rinci, diawali dengan riset untuk memperoleh data, dan upaya untuk mengetahui kebutuhan khalayak (*need assessment*). Model ini juga bisa di aplikasikan untuk kegiatan pemasaran komersial dan jasa, serta pemasaran politik.

Model ini juga spesifik karena dalam penyusunan rencana berbasis data base. Sistem informasi manajemennya memberi kontribusi untuk analisis perencanaan dan pengembangan strategi, serta penetapan segmentasi khalayak. Dalam pelaksanaan program ia berbasis sistem informasi manajemen. Model perencanaan komunikasi yang dibuat oleh John Middleton dijabarkan dalam gambar dibawah ini (Cangara, 2017):

- a. Pengumpulan data base-line dan need assessment
- b. Perumusan tujuan komunikasi
- c. Analisis perencanaan dan pengembangan strategi
- d. Analisis dan segmentasi khalayak
- e. Pemilihan media
- f. Design dan pengembangan pesan
- g. Perencanaan manajemen
- h. Pelaksanaan pelatihan
- i. Implementasi atau pelaksanaan
- j. Evaluasi program

Gambar 2.6 Model Perencanaan Komuniksai John Middleton



Sumber : Perencanaan dan Strategi Komunikasi
(Cangara, 2017)

Model perencanaan komunikasi yang dibuat John Middleton sangat berbeda dengan model perencanaan komunikasi lainnya. Menurut John Middleton dalam perencanaan komunikasi ialah proses penentuan sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Sumber daya komunikasi bukan hanya mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, akan tetapi semua aktivitas yang dirancang untuk merubah tingkah laku dan mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu di setiap individu maupun kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang diamanahkan oleh organisasi.

2. Information, reflexivity and surveillance: Anthony Giddens

Anthony Giddens (lahir 1938) sosiolog penting yang pernah dihasilkan Inggris selama lebih dari seabad. Ambisinya telah lama menjadi

teori rekastosal dan untuk memeriksa kembali pemahaman kita tentang lintasan 'moderat'. Anthony Giddens adalah seorang teoritikus sosial yang membangun teorinya secara eklektik. Giddens mengkritik banyak teori sosial yang menjadi warisan “tradisi ortodoks” sekaligus menggunakan bagian-bagiannya sebagai titik tolak kritis untuk membangun teorinya sendiri (Webster, 2006). Kita ketahui bahwa pemaparan awal tentang konsep-konsep utama dalam teori strukturasi Anthony Giddens sangat tepat dimulai dari bagian-bagian yang telah memisahkan fungsionalisme (termasuk teori sistem) dan strukturalisme dari hermeneutika di satu sisi dan berbagai bentuk “sosiologi interpretatif” (Giddens, 2010).

Anthony Giddens menangani tugas-tugas menakutkan dengan cara yang sangat imajinatif, mengintegrasikan kritik teoritis yang berkelanjutan dengan kapasitas yang patut ditiru untuk membuat konsep dan menjelaskan perubahan di dunia. Dari kritik rinci terhadap ahli teori sosial, dia mengembangkan 'teori strukturasinya' pada awal 1980-an, setelah itu dia beralih ke analisis yang lebih substantif dari 'modernisasi refleksif'.

Sejak akhir 1980-an, Giddens telah menerapkan konsepsi ini dan penekanannya pada 'pilihan' yang kita buat dalam dunia 'ketidakpastian buatan' lebih langsung ke perubahan praktis. (Webster, 2006). Anthony Giddens berpandangan bahwa kita hidup hari ini dalam zaman 'modernitas radikal', yang ditandai dengan percepatan perkembangan ciri-ciri yang lama dari modernitas itu sendiri. Faktanya, dia telah menegaskan bahwa 'Meskipun secara umum dianggap bahwa kita baru sekarang. memasuki

era informasi, masyarakat modern telah menjadi "masyarakat informasi" sejak awal mereka.

Sejalan dengan itu, teori Giddens membuat orang berargumen bahwa semakin pentingnya informasi memiliki akar yang begitu dalam dalam sejarah, sementara informasi memiliki arti khusus saat ini, tidaklah cukup untuk menandai kerusakan sistem seperti yang dianggap Daniel Bell sebagai 'pasca-industrialisme'. Dengan kata lain, kita menemukan cara untuk menghitung informasi dari hubungan kapal di dunia modern, meskipun dia tidak akan membantah bahwa kita sedang memasuki "masyarakat informasi baru".

Kelihatannya begitu jelas bagi mereka bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi yang mereka rayakan menganggap tidak perlu mengklarifikasi dengan tepat apa yang mereka maksud dengan konsep tersebut. Mereka banyak menulis tentang ciri-ciri tertentu dari masyarakat informasi, tetapi memang demikian tidak jelas tentang kriteria operasional mereka. Bersemangat untuk memahami perubahan dalam informasi, mereka buru-buru menafsirkannya dalam berbagai bentuk ekonomi produksi, bentuk baru interaksi sosial, proses produksi yang inovatif atau terserah. Namun, ketika mereka melakukannya, mereka sering gagal menetapkan dengan cara apa dan mengapa informasi menjadi lebih sentral saat ini, bahkan begitu kritis mengantarkan tipe masyarakat baru. Mungkin untuk membedakan lima definisi masyarakat informasi, masing-masing menyajikan kriteria untuk mengidentifikasi yaitu:

- a. Teknologi, Konsepsi teknologi berpusat pada serangkaian inovasi yang muncul sejak akhir 1970-an. Teknologi baru adalah salah satu indikator yang paling terlihat di era saat ini, dan karenanya sering dianggap sebagai sinyal kedatangan masyarakat informasi. Ini termasuk televisi kabel dan satelit, komputer-ke-komputer komunikasi, komputer pribadi (PC), teknologi kantor baru, terutama layanan informasi online dan pengolahan kata, dan fasilitas serumpun.
- b. Ekonomi, pendekatan ini memetakan pertumbuhan nilai ekonomi dari aktivitas informasional. Jika seseorang dapat merencanakan peningkatan proporsi Produk Nasional Bruto (GNP) dipertanggungjawabkan oleh bisnis informasi, maka secara logis ada benarnya yang mana seseorang dapat mendeklarasikan pencapaian ekonomi informasi. Setelah sebagian besar dari kegiatan ekonomi diambil oleh kegiatan informasi daripada, katakanlah, pertanian subsisten atau industri manufaktur, maka kita boleh berbicara tentang masyarakat informasi (Jonscher, 1999).
- c. Pekerjaan, ini adalah pendekatan yang paling disukai oleh sosiolog. Itu juga salah satu yang terkait erat dengan karya Daniel Bell (1973) yang merupakan ahli teori terpenting 'Masyarakat pasca-industri' (istilah yang identik dengan 'masyarakat informasi' dan digunakan seperti dalam tulisan Bell sendiri). Di sini struktur pekerjaan diperiksa waktu dan pola perubahan yang diamati. Sarannya adalah kita telah mencapai masyarakat informasi ketika dominasi pekerjaan ditemukan dalam informasi kerja.
- d. Spasial, konsepsi masyarakat informasi ini, sementara itu mengacu pada ekonomi dan sosiologi, pada intinya menekankan pada ahli geografi pada ruang. Di sini mayor penekanannya adalah pada jaringan informasi yang menghubungkan lokasi dan sebagai konsekuensinya dapat memiliki pengaruh yang sangat besar pada pengaturan waktu dan ruang. Memiliki menjadi indeks yang sangat populer dari masyarakat informasi dalam beberapa tahun terakhir sebagai jaringan informasi telah menjadi fitur penting dari organisasi sosial. Biasanya untuk menekankan sentralitas jaringan informasi yang mungkin menghubungkan berbagai lokasi di dalam dan di antara kantor, kota, kawasan, benua-memang, seluruh dunia.
- e. Budaya, Konsepsi akhir masyarakat informasi mungkin yang paling mudah diakui, namun paling tidak terukur. Masing-masing dari kita sadar, dari pola kita kehidupan sehari-hari, bahwa telah terjadi peningkatan informasi yang luar biasa dalam sirkulasi sosial. Ada jauh lebih banyak tentang itu daripada sebelumnya sebelum. Televisi telah digunakan secara luas sejak pertengahan 1950-an di Inggris, tetapi sekarang pemrogramannya cukup baik sepanjang waktu. Ini telah berkembang dari satu saluran ke lima

saluran siaran, dan digitalisasi terus menjanjikan masih banyak lagi. Televisi telah ditingkatkan untuk menggabungkan teknologi video, saluran kabel dan satelit, dan bahkan layanan informasi terkomputerisasi

Giddens juga mengatakan bahwa hidup semakin lama semakin tidak melekat, yang berarti bahwa, semakin banyak, kehidupan tidak dikendalikan oleh komunitas atau alam. Dalam situasi tertentu seseorang melakukan 'apa yang harus' karena, misalnya, kepercayaan dan adat istiadat lingkungan di mana satu-satunya kehidupan tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat ditandingi, atau karena perintah alam terlalu banyak (sapi harus diperah, tanaman harus ditanam). Sebaliknya, saat ini orang semakin memilih cara hidup, secara pribadi maupun kolektif.

Masalah utamanya, adalah bahwa semakin diakui bahwa pengaturan yang kita lakukan tidak diberikan, tetapi dibangun secara sosial, oleh karena itu dipilih. Oleh karena itu, mereka yang menolak pertimbangan pilihan dianggap sebagai 'fundamentalis' dari satu jenis atau lainnya yang jalannya dengan prinsip-prinsip yang tunduk pada tantangan dan, memang, secara teratur ditantang (misalnya 'itu kehendak Tuhan', 'anak-anak harus mematuhi orang tua mereka', 'wanita dilahirkan untuk pelayan', 'sains membuktikan bahwa'..., 'hanya ada satu agama yang benar').

Modernitas menjadi masalah peningkatan pilihan yang dibuat di setiap tingkat memerlukan reflektivitas yang tinggi, di mana Giddens berarti peningkatan pengawasan (pengumpulan informasi) sehingga kita dapat mengembangkan pengetahuan yang dapat membuat pilihan tentang diri

kita sendiri dan jenis masyarakat yang kita inginkan. Lagi pula, jika agama saat ini semakin menjadi masalah keyakinan pribadi, maka orang membutuhkan informasi tentang agama lain sebagai syarat untuk membuat pilihan sendiri. Sekali lagi, jika semakin banyak orang yang memilih untuk mengadopsi gaya hidup yang menarik bagi mereka, maka syaratnya adalah bahwa banyak informasi harus tersedia untuk mereka tentang gaya hidup yang bervariasi, paling tidak agar mereka dapat menolak gaya hidup yang mungkin disukai orang lain untuk mereka adopsi. Pilihan hanya dimungkinkan jika informasi telah dikumpulkan tentang situasi aktual dan kemungkinan, karena itu pemantauan pengaturan harus dilakukan.

Cara yang sama, di mana ada reflektivitas yang tinggi pasti ada juga cara untuk membuat informasi ini tersedia untuk orang lain, dan karenanya ada pusat peran yang harus dimainkan oleh segala macam media di dunia saat ini. Jika pelepasan membutuhkan reflektivitas yang tinggi, ini juga memiliki konsekuensi besar untuk mengontrol masa depan kita. Yang terpenting, pengumpulan dan analisis informasi memungkinkan kita untuk memilih masa depan kita berdasarkan 'penilaian risiko'.

Artinya, saat ini kita mengamati situasi, merenungkan apa yang kita pelajari, lalu menghitung konsekuensi dari memutuskan opsi tertentu. Misalnya, setiap orang yang menikah akan mempertimbangkan kualitas pasangan yang dilamar sebelum mengambil risiko, akan mengetahui risiko perceraian, dan mereka akan menyadari kemungkinan besar kegagalan pernikahan jika mereka telah bercerai sebelumnya. Ini bukan proses yang

tepat, tetapi jelas bahwa keputusan yang sedemikian intim melibatkan penilaian risiko yang diinformasikan oleh pertimbangan seseorang tentang hubungan sejauh ini dan informasi apa yang dapat dikumpulkan di tempat lain.

Ketika pemerintah atau perusahaan mengadopsi kebijakan terhadap lingkungan, transportasi atau pertanian, prinsip-prinsip serupa datang ke dalam operasi: pengawasan dan pengumpulan informasi, refleksi dan keputusan yang dibuat berdasarkan penilaian risiko. Hidup seperti yang kita lakukan, kecemasan dan ketidakpastian mengikuti medan. Ini membuat sebuah paradoks: kita sekarang memiliki lebih banyak kebebasan dan kendali atas hidup kita daripada nenek moyang kita, namun kita bisa dibilang lebih tidak yakin bagaimana harus bertindak daripada mereka yang hanya 'melakukan apa yang harus mereka lakukan'. Anak-anak dibesarkan dengan cara tradisional, tugas dilakukan karena mereka 'harus dilakukan', kematian adalah 'fakta alam'.

3. *Chaos Theory*: Edward Lorenz

Chaos theory berkaitan dengan proses alam yang nampaknya kacau atau *Chaos theory* berkaitan dengan proses alam yang nampaknya kacau atau acak. *Chaos* menunjukkan ketidakberaturan, kekacauan, keacakan atau kebetulan, yaitu: gerakan acak tanpa tujuan, kegunaan atau prinsip tertentu (Woods dan Grant, 2006). Alam semesta yang bersifat dinamis yang terlihat seperti bekerja melalui sistem yang linier, tetapi banyak juga yang tidak bekerja secara linier dan tidak dapat dipahami melalui sistem

linier, seperti awan, pohon, garis pantai, ombak dan lain sebagainya, yang secara sekilas menampakkan keacakan yang tidak teratur. Sistem seperti inilah yang dinamakan dengan teori chaos, yaitu suatu teori yang berkaitan dengan proses alam yang nampaknya kacau, acak dan tidak linier (system yang tidak dapat diprediksi berdasarkan kondisi awal). Secara umum *chaos theory* adalah teori yang menjelaskan gerakan atau dinamika yang kompleks dan tidak terduga dari sebuah system yang tergantung dari kondisi awalnya.

Istilah "*chaos*" dirumuskan pertama kali oleh Henri Poincaré (1854-1912), seorang ahli matematika Perancis. Hendri menemukan bukti bahwa system tata surya tidak bekerja secara teratur dan dapat diprediksi dengan pasti, dan mengungkapkan bahwa "dapat terjadi perbedaan kecil pada kondisi awal menghasilkan peristiwa yang berdampak sangat besar. Sebuah kesalahan kecil pada permulaannya akan menghasilkan penyimpangan yang lebih besar (Kusmarni, 2008) . Prediksi akan menjadi hal yang mustahil. Semula gagasan Henri Poincaré tidak terlalu dihargai oleh para ilmuwan pada saat itu, sampai penemuan computer yang memungkinkan para ahli membuat model dan menggambarkan system chaostik

Chaos theory pertama kali dicetuskan oleh seorang meteorologis bernama Edward Lorenz pada tahun 1961. *Chaos theory* berusaha mencari bentuk keseragaman dari data yang kelihatannya acak. Teori ini ditemukan secara tidak sengaja, Lorenz pada saat itu sedang mencari penyebab

mengapa cuaca tidak bisa diramalkan. Ia menggunakan bantuan computer dan menggunakan 12 model rumusan. Program yang ia ciptakan tidak bisa memprediksi cuaca, tetapi dapat menggambarkan seperti apa cuaca tersebut jika diketahui titik awalnya. Teori ini memiliki asumsi yaitu "Satu kepakan sayap kupu-kupu di Brazil mampu menimbulkan Tornado di Texas". Kemudian asumsi tersebut telah banyakk dimodifikasi oleh beberapa pakar seperti halnya:

"Bila satu komponen kecil diubah dengan berjalannya waktu, maka duniapun akan terlihat berbeda. Satu Muhammad lahir dan Asia pun bangun dari mimpi jahiliah. Satu Yesus hadir dan seluruh dunia Barat pun berubah. Satu Gautama tercerahkan dan seluruh kepercayaan Hindu-Budha di India meluas. Satu Hitler muncul dan seluruh dunia terlibat dalam perang dahsyat yang menewaskan lebih dari 20 juta manusia.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam *Chaos theory*, sebuah gerakan yang sekecil apapun akan menimbulkan dampak yang begitu besar. Mungkin dampak tersebut tidak dapat dirasakan pada saat dan tempat yang diharapkan (Kusmarni, 2008). *Chaos theory* tidak diragukan lagi merupakan satu kemajuan besar, tapi di sini juga ada beberapa perumusan yang dapat dipertanyakan. asumsi *chaos theory* yang terkenal itu, memang salah satu contoh yang sangat sensasional, yang ditujukan untuk memicu satu kontroversi. Tapi, pernyataan ini tidak tepat dalam bentuknya. Satu kejadian acak yang kebetulan (seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya) hanya dapat menghasilkan efek yang dramatis jika semua kondisi untuk timbulnya badai telah tersedia. Dalam kasus ini,

keharusan dapat menyatakan dirinya melalui sebuah kebetulan. Tapi hanya dalam kasus ini.

Hubungan dialektik antara keharusan dan peluang dapat dilihat dalam proses seleksi alam. Jumlah mutasi acak di dalam satu organisme adalah besar tak berhingga. Tapi, dalam lingkungan tertentu, salah satu mutasi ini ditemukan bermanfaat bagi organisme tersebut dan dipertahankan, sementara mutasi yang lain lenyap. Keharusan sekali lagi mewujudkan dirinya melalui perantaraan kebetulan. Dalam makna tertentu, kemunculan hidup di bumi dapat pula dilihat sebagai sebuah "kebetulan". Tidakkah ditakdirkan bahwa bumi harus berada pada jarak yang tepat dari matahari, dengan besar gravitasi dan jenis atmosfer yang tepat, bahwa semua ini harus terjadi. Tapi, karena kejadian-lingkup yang berantai ini, reaksi kimia yang jumlahnya tak berhingga, yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang, kehidupan niscaya akan muncul.

Chaos theory merupakan salah satu teori yang juga dapat digunakan dalam memotret bencana. Di tengah krisis komunikasi, teori ini kemudian digunakan pula oleh beberapa ilmuwan untuk mempelajari bencana. Meskipun memiliki potensi penting dalam studi komunikasi krisis (Purworini, 2019). *Chaos theory* telah memperkaya banyak bidang penelitian dengan memperluas aplikasi perspektif sistem ke operasi non linear dari sistem yang besar dan kompleks.

Pandangan ini juga berpotensi untuk memperjelas dimensi komunikasi sistem tersebut, termasuk peran ketidakpastian, ketidakjelasan, dan prediktabilitas. Secara khusus, dapat menjelaskan bagaimana komunikator mencirikan perilaku sistem tersebut dalam deskripsi dan prediksi hasil mereka. *Chaos theory* memperluas perspektif sistem ke perilaku atau sistem non linier yang besar dan kompleks, termasuk sistem di mana elemen sosial dan teknis berinteraksi dengan cara yang sangat dinamis dan tidak proporsional. Interaksi normal dalam sistem yang sangat kompleks ini meningkatkan kemungkinan bahwa hasil yang tidak terduga dan sangat mengganggu akan terjadi.

Faktor dasar yang digunakan untuk menjelaskan perilaku sistem yang kompleks adalah prinsip ketergantungan yang sensitif pada kondisi awal, sering disebut efek kupu-kupu. Selama periode waktu tertentu, apa yang sebenarnya dilakukan atmosfer menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, dalam waktu sebulan tidak terjadi tornado yang akan meluluhlantahkan pantai Indonesia, atau mungkin salah satu yang tidak akan terjadi. Stewart menggambarkan sistem yang kompleks dengan cara yang menekankan keterbukaan dan kepekaannya terhadap pengaruh, banyak di antaranya tidak dapat diukur atau dipahami dengan menggunakan metode tradisional.

Dampak varian yang bahkan kecil, kebisingan latar belakang, dalam kombinasi dengan kurangnya "presisi tak terbatas dalam pengukuran kondisi awal" menunjukkan bahwa prediktabilitas tidak mungkin, misalnya,

menggambarkan peran komunikasi dalam bencana *Shuttle Challenger* sebagai contoh efek kupu-kupu. "Kupu-kupu - dalam hal ini kesalahan dalam komunikasi menghasilkan efek penguatan yang memiliki hasil yang tidak terduga-menimbulkan serangkaian masalah baru bagi badan antariksa, yang masih bertahan hingga hari ini".

C. Hasil Riset Relevan

Penelitian bertema komunikasi bencana telah banyak dilakukan dengan spesifikasi dan perspektif yang berbeda-beda pada masing-masing penelitian, maka penulis mengambil beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu terkait Komunikasi Bencana

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
(Muktaf, 2017)	Studi Literasi Bencana dalam Perspektif Ilmu Komunikasi	Dengan fokus penelitian pada komunikasi bencana dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
(Tagliacozzo dan Magni, 2016)	<i>Communicating with communities (CwC) during post-disaster reconstruction: an initial analysis.</i>	Penelitian ini memiliki persamaan terkait peran komunikasi pada saat manusia sedang mengalami bencana yang dianggap sebagai bagian integral dari bantuan kemanusiaan. Perbedaan terletak pada metode penelitian.
(Nicholls dan Healy, 2007)	<i>Communication with disaster survivors: Towards best practice</i>	Penggunaan komunikasi dalam upaya membantu pemulihan masyarakat korban tragedi New York dan London. Persamaan penelitian ini terletak pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh lembaga dan individu yang terlibat dalam membantu pemulihan orang-orang yang selamat. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai bencana non-alam

		sedangkan penulis lebih kepada bencana alam dan di sisi lain objek dan fokus penelitian yang menjadi pembeda.
(Badri, 2011)	Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Sosial Pasca bencana	Penelitian ini memiliki persamaan dari perspektif komunikasi bencana di mana sistem komunikasi diperlukan agar kegiatan penanganan bencana lebih terkoordinasi dengan baik sehingga berjalan efektif dan efisien.
(Suherman, 2019)	Strategi Komunikasi Bencana Pada Masyarakat Kabupaten Buton Selatan	Fokus penelitian membahas perihal strategi komunikasi bencana melalui pendekatan kualitatif. Selain itu perbedaannya terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan suherman lebih kepada mitigasi dan tanggap darurat.

Pada penelitian yang pertama yang dilakukan (**Muktaf, 2017**) dengan judul “**Studi Literasi Bencana dalam Perspektif Ilmu Komunikasi**”. Kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan studi kebencanaan yang lebih mendalam sebagai bagian dari pengembangan terhadap pengurangan resiko bencana. Oleh karenanya pada penelitian ini membahas bagaimana memahami literasi bencana dari sudut pandang komunikasi, karena diketahui bahwa studi literasi bencana fokus pada bagaimana tingkat pemahaman dan daya kritis masyarakat terkait dengan bencana, sehingga penelitian ini lebih mengulas tentang apa itu literasi bencana, posisi dan peran ilmu komunikasi dalam studi literasi bencana.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Tagliacozzo dan Magni, 2016) dengan judul “***Communicating with communities (CwC) during post-disaster reconstruction: an initial analysis***”, pada penelitian ini membahas mengenai kebutuhan informasi dan komunikasi penduduk dan peran media sosial selama proses rekonstruksi pasca bencana yang melanda Emilia-Romagna (Italia Utara) pada tahun 2012. Penelitian ini memiliki persamaan dari objek penelitian yaitu terkait kebutuhan komunikasi pasca bencana. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu terletak pada penggunaan pendekatan metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method*, disisi lain penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Di samping itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh (Nicholls dan Healy, 2007) dengan judul “***Communication with disaster survivors: Towards best practice***”. Pada penelitian ini berlatar belakang dari salah satu peristiwa serangan terorisme paling mengerikan yang pernah terjadi di Amerika Serikat adalah penyerangan menara World Trade Center (WTC) atau yang lebih dikenal dengan serangan 9/11. Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh lembaga dan individu yang terlibat dalam membantu pemulihan orang-orang yang selamat.

Diperoleh hasil bahwa terdapat kompleksitas, kesamaan karakter dan keunikan bentuk komunikasi yang digunakan dalam pemulihan. Upaya pemerintah federal untuk memulihkan kesehatan mental publik pasca

tragedi 9/11 dilakukan melalui kampanye melalui Proyek Liberty dengan menyebarkan pesan-pesan distasiun kereta, warung-warung kopi dan tempat umum lainnya guna memberikan pertolongan bagi korban.

Selain itu, pesan-pesan kampanye "*Feel Free to Feel Better*" atau jangan ragu untuk merasakan lebih baik, "saya tidak merasa sendirian", "bahkan super hero kadang-kadang butuh pertolongan" yang disebarluaskan melalui poster-poster membuat korban-korban tragedi 9/11 merasa lebih baik. Pesan-pesan tersebut digunakan untuk menguatkan mental publik bahwa mereka baik-baik saja, tidak sakit mental dan tidak ragu untuk meminta pertolongan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **(Badri, 2011)** dengan judul "**Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Sosial Pasca bencana**", pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi diperlukan agar kegiatan penanganan bencana lebih terkoordinasi dengan baik sehingga berjalan efektif dan efisien. Keterlibatan banyak pihak dalam penanganan bencana menunjukkan adanya sistem komunikasi yang berjalan baik secara alamiah maupun melalui intervensi kebijakan. Paradigma sistem komunikasi dalam penanganan bencana bukan hanya melibatkan pemerintah tetapi juga harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat dibandingkan memberikan bantuan sesaat (*charity*). Sehingga dapat menjadi sebuah strategi yang ideal dengan tujuan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti semula.

Penelitian terakhir dilakukan oleh **(Suherman, 2019)** dengan judul **“Strategi Komunikasi Bencana Pada Masyarakat Kabupaten Buton Selatan”**, pada penelitian ini terdapat persamaan pada fokus penelitian yaitu membahas tentang strategi komunikasi dalam penanganan bencana dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di mana unsur komunikasi yang turut menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan adalah pelaku komunikasi baik dari unsur pemerintah lokal maupun masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Secara umum kekhawatiran dan rasa takut akan bencana susulan begitu sangat dirasakan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Luwu Utara terutama di Kecamatan Masamba-Baebunta. Dalam studi kebencanaan kehadiran komunikasi tentu menjadi hal yang sangat diperhitungkan, yang kiranya dapat menjadi tolak ukur dalam setiap penanganan bencana.

Dalam penyebaran informasi perihal penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, tentu diperlukan suatu cara, teknik ataupun pendekatan yang dirasa efektif dengan menggunakan berbagai saluran atau media komunikasi yang dipergunakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara baik media cetak, elektronik, media luar ruang, maupun melalui media sosial guna menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain saluran komunikasi, hal penting yang patut menjadi perhatian adalah isi pesan dari informasi yang diberikan pada masyarakat terutama

menyangkut upaya pemulihan pasca bencana agar sasaran khalayak dapat menerima dan memahami dengan baik apa yang disampaikan.

Upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik diperlukan suatu proses dan prosedur penelitian yang efektif. Untuk itu diperlukan Kerangka pemikiran yang dapat memberikan gambaran penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini didasari oleh konsep dan teori yang telah diuraikan sebelumnya sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual



E. Definisi Operasional

1. Komunikasi Bencana

adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh satu orang atau lebih, secara langsung maupun melalui media, dalam konteks kebencanaan pada saat prabencana, saat terjadi bencana, pasca bencana dan menimulkan respon ataupun umpan balik terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara.

2. Strategi komunikasi

adalah serangkaian tindakan yang direncanakan melalui kombinasi terbaik dari berbagai unsur atau elemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan metode, teknik, dan pendekatan komunikasi.

3. Pemulihan

adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya normalisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Sosial ekonomi

adalah segala aktivitas atau kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, keagamaan, hunian, sarana dan prasarana) dan ekonomi (perdagangan, pertanian, dan pelaku UMKM).